LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NIAS SELATAN

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan berkat dan anugerah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Demikian juga dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun untuk memberikan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggungjawab kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama satu di tahun 2025, sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan yaitu: "***Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban***" sesuai yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan tahun 2025-2029.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Teluk Dalam, 4 Maret 2026

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Nias Selatan,

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN DINAS PKP

FOTUHO LAIA, S.E.
Pembina Tk. I
NIP. 19710223 200112 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri secara optimal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan senantiasa mendasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh kegiatan pemerintahan yang dimulai dari pembangunan dan pelayanan masyarakat harus mampu dipertanggungjawabkan kepada publik baik jajaran Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat umum. Laporan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2025, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan program dan kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja tahun 2025. Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 mencapai tujuan tentang meningkatkan penyediaan rumah layak huni dan kualitas kawasan permukiman yang aman, terjangkau dan berkelanjutan maka didukung beberapa indikator antara lain rasio rumah layak huni, rasio permukiman layak huni dan persentasi permukiman yang tertata. Serta mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan antara lain [1]Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi MBR maupun msayarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan, [2]Meningkatnya kualitas kawasan permukiman, [3]Meningkatnya penyediaan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang memenuhi standar, [4]Meningkatnya pembangunan jaringan jalan lingkungan yang melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman, [5]Meningkatnya akses layanan air minum dan [6]Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah. Sedangkan sasaran berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 yang ditetapkan antara lain [1]Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM dan [2]Peningkatan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman. Dengan kata lain setiap program/kegiatan diharapkan mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan penetapan kinerja tahun 2025 berdasarkan realisasi anggaran, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran sesuai Rencana Strategis tahun 2021-2026 adalah 100% (sangat baik), keberhasilan ini dicapai dari 2 (Dua) sasaran strategis yang ditetapkan antara lain 1 (satu) sasaran memperoleh tingkat capaian kinerja diatas 100% (sangat baik) dan sasaran yang ke 2 (dua) memperoleh tingkat capaian kinerja 100% (Sangat Baik).

Terlaksananya sasaran pada Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 karena memiliki indikator yang dapat diukur. Memperoleh pencapaian 100% dari 4 (empat) sasaran yang dilaksanakan.

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2025 termasuk dalam kategori sangat baik, namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Adapun beberapa permasalahan dalam pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja belum sepenuhnya berjalan dengan baik, akibatnya kurang mampu menjadi umpan balik dalam mengevalusi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan;
2. Belum optimalnya perumusan sasaran dengan program dan kegiatan. Selain itu belum tepat perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, serta beberapa indikator juga belum menyajikan penentuan target secara tepat;
3. Belum sepenuhnya terjadi sinergitas dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, sehingga masih terdapat beberapa sasaran yang tingkat pencapaian indikator kinerjanya kurang optimal;
4. Masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan kompetensi guna pelaksanaan tugas dengan kompetensi yang dimiliki aparatur. Hal ini mengakibatkan kurangnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
5. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan sering tidak berhasil secara optimal dan kurang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Memperbaiki dan mempertahankan kinerja selanjutnya, diperlukan langkah-langkah antara lain:

1. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta mampu menjadi umpan balik dalam mengevalusi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan;
2. Penyelarasan dalam perumusan sasaran, perumusan indikator kinerja dengan program dan kegiatan. Disamping itu, indikator juga diupayakan dapat menyajikan penentuan target secara tepat sehingga mampu menggambarkan capaian kinerja yang senyatanya;
3. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada skala prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) / Renstra yang telah disusun dan disepakati bersama;
4. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan juga instansi-instansi di tingkat Provinsi dan pusat guna membangun sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan semua urusan pemerintahan;

5. Meningkatkan kompetensi dan responsibilitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan upaya-upaya lain, sehingga diharapkan segala permasalahan yang timbul, dapat segera direspon secara cepat dan akurat tanpa menimbulkan permasalahan baru;
6. Meningkatkan pendekatan kepada masyarakat dengan mensosialisasikan setiap program dan kegiatan serta dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada Perangkat Daerah semakin meningkat.

Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan tingkat partisipasi masyarakat akan semakin meningkat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GRAFIK vii
DAFTAR LAMPIRAN viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi OPD 2
C. Landasan Hukum 6
D. Sistematika Penyusunan 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA 9
A. Perencanaan Strategis 9
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama 10
C. Cascading/Pohon Kinerja 14
D. Rencana Aksi 14
E. Perjanjian Kinerja 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19
A. Capaian Kinerja Organisasi/Perangkat Daerah 19
B. Realisasi Anggaran 45
BAB IV PENUTUP 48
A. Kesimpulan 48
B. Saran 48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah dan Indikator berdasarkan Target Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 11

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah dan Indikator berdasarkan Target Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 - 2026 13

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 15

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 16

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 17

Tabel 2.6 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 17

Tabel 3.1 Skala pengukuran keberhasilan dalam pencapaian target kinerja 20

Tabel 3.2 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 21

Tabel 3.3 Perbandingan Target berdasarkan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025 24

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dengan Rencana Strategis pada Tahun Anggaran 2023, 2024 dan Tahun Anggaran 2025 33

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dengan Rencana Strategis pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 36

Tabel 3.6 Capaian Sasaran Indikator Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas PKP Kabupaten Nias Selatan 40

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Persentase penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah 42

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan berdasarkan Persentase ASN mengikuti Diklat Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan 43

Tabel 3.9 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 46

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025..... 43

Grafik 3.2 Capaian Program Pengembangan Perumahan Tahun 2025..... 44

Grafik 3.3 Capaian Program Kawasan Permukiman Tahun 2025..... 44

Grafik 3.4 Capaian Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Tahun 2025..... 45

Grafik 3.5 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2025..... 47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2026
Lampiran 3	Cascading/Pohon Kinerja Tahun 2026
Lampiran 4	Renja Tahun 2025 dan Renja Tahun 2026
Lampiran 5	Rencana Aksi Tahun 2025
Lampiran 6	Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2025
Lampiran 7	Rencana Aksi Tahun 2026
Lampiran 8	Indikator Kinerja Utama
Lampiran 9	Laporan Hasil Evaluasi AKIP
Lampiran 10	Matriks Tindaklanjut Rekomendasi Inspektorat
Lampiran 11	Foto kegiatan fisik T.A 2025
Lampiran 12	Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab, memiliki bahan acuan dan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan layanan program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Mendapatkan hasil Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan sebagai dinas teknis, tetap melakukan perencanaan dan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

AKIP merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengimplementasian Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP), dapat berorientasi pada hasil kinerja yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan untuk memberikan

informasi secara terbuka dan mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Instansi Pemerintah didorong untuk memperbaiki kualitas Laporan Kinerjanya.

B. Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi OPD

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan urusan wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Selatan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Nias Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Sesuai Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
b. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
c. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati bersama Menteri teknis.

2. Sekretaris

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris melaksanakan fungsi:

a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
d. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara;
e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas diatas Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yaitu:

1. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik

Mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama;
e. Pelaksanaan kegiatan strategis dinas;
f. Penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
g. Pengembangan sistim informasi;
h. Penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan dan dan informasi;
i. Pengendalian mutu sistim dan teknologi informasi;
j. Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik;
k. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
l. Penyelenggaraan publik;
m. Pengelolaan dan penyebarluasan informasi;
n. Pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas;
o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

2. **Sub Bagian Ketatausahaan**

Mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan sertatata usaha pegawai;

b. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

c. Pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;

d. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan;

e. Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

f. Pelakasanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

g. Pelakasanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNBP dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

3. **Bidang Perumahan**

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan.

Dalam menjalankan fungsinya bidang perumahan dibantu oleh 3 (tiga) seksi, yaitu:

1. **Seksi Pendataan dan Perencanaan**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan.

2. **Seksi Penyediaan dan Pembiayaan**

Mempunyai tugas pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan.

3. **Seksi Pemantauan dan Evaluasi**

   Mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan.

4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan serta pengendalian kawasan permukiman. Dalam menjalankan fungsinya bidang permukiman dibantu oleh 3 (tiga) seksi, yaitu:

1. **Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman**

   Mempunyai tugas melakukan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.

2. **Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan**

   Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

3. **Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian**

   Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.

5. Unit Pelaksana Teknis

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Peranan perangkat daerah memberhasilkan layanan program pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman kepada masyarakat dilakukan dengan penyelenggaraan berbagai kegiatan positif yang bisa bersentuhan langsung kepada masyarakat, walaupun terdapat beberapa hal yang masih belum optimal pelaksanaannya. Hal ini merupakan tantangan pembangunan ke depan yang kompleksitas antara lain rendahnya kemampuan ekonomi rumah tangga dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumah sehingga masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni. Program pembangunan urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman perlu didukung perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah. Untuk itu, pelaksanaannya berpedoman dari Rencana strategis tahun 2025 - 2029 yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh organisasi selama 5 (lima) tahun dan tertuang dalam dokumen rencana strategis OPD. Isu-isu

pembangunan dan penuntasan kebutuhan dasar masyarakat merupakan kandungan utama untuk ditampung dalam sistem perencanaan.

C. Landasan Hukum

AKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2026;
19. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
20. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan;

21. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 72 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029;
22. Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/738/2025 tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029.

D. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan menjelaskan keadaan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalah utama meliputi gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, dan dasar hukum.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2024 meliputi Inidikator Kinerja Utama (IKU), Cascading/Pohon Kinerja Tahun 2024, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan Perjanjian Kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. capaian kinerja organisasi (Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja dengan capaian tahun ini, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis sasaran strategis.

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Membuat kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan tindaklanjut kedepan meningkatkan kinerja organisasi.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan. Rencana Strategis tersebut, ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan periode 2025 – 2029, bertujuan meningkatkan penyediaan rumah layak huni dan kualitas kawasan permukiman yang aman, terjangkau dan berkelanjutan. Rencana Strategis ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2025 - 2029.

Rencana Strategis, dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen penting dari perencanaan OPD setiap 1 (satu) tahun dan bisa dievaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan. Evaluasi kinerja instansi pemerintah, disajikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun anggaran 2025. Karena adanya peralihan rencana strategis yang sudah ditetapkan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, perlu melakukan penyelarasan pada dokumen perencanaan strategis. Sehingga evaluasi kinerja lebih fleksibel menggunakan dokumen rencana strategis DPKP tahun 2021 – 2026 dan membandingkan dalam rencana strategis DPKP tahun 2025 – 2029.

Terwujudnya Perencanaan yang ideal, memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan setiap tahunnya. Indikator kinerja menjadi tolok ukur dalam rangka menyukseskan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan. Visi dan misi dimaksud, sebagai berikut.

1. Visi:

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan. Mengandung makna bahwa Kabupaten Nias Selatan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu

dibangun untuk mewujudkan Kabupaten Nias Selatan yang maju dan mandiri. Visi yang dipedomani Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan periode 2025 - 2029 adalah: ***"Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban."***

2. **Misi:**

Tercapainya visi tidak terlepas dari misi yang ditetapkan. Maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan merumuskan dan memilih 2 (dua) misi sebagai urusan wajib pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, antara lain:

Misi 1 : Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat;

Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat.

Misi ini mendukung program nasional dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, SDGs, SPM serta intervensi stunting. Dukungan itu, diinterprestasikan pada penyediaan hunian layak dan permukiman layak huni serta penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman serta pemerintah daerah berupaya mewujudkan terselenggaranya reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik bermutu dan berdaya guna.

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Tujuan, sasaran, program, indikator kinerja dan target Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 – 2029, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah dan Indikator berdasarkan Target Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran Strategis/ Program	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan penyediaan rumah layak huni dan kualitas kawasan permukiman yang aman, terjangkau dan berkelanjutan.		1. Rasio Rumah Layak Huni (Rasio).	0,11	0,11	0,12	0,13	0,14
			2. Rasio Permukiman Layak Huni (Rasio).	0,14	0,14	0,26	0,38	0,50
			3. Persentase Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan.	12,50	12.91	13.32	13.73	14.14
			4. Persentasi Permukiman yang Tertata.	37.09	40	45	50	55
		1. Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi MBR maupun msayarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan.	a. Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH.	11	15	20	25	30
			b. Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota.	100	100	100	100	100
			c. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota.	100	100	100	100	100
		2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman.	d. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani.	20	22	24	26	28
		3. Meningkatnya akses layanan air minum.	e. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	70	72	74	76	78
		4. Meningkatnya pembangunan jaringan jalan lingkungan yang melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman.	f. Persentase jaringan jalan lingkungan dalam kondisi baik.	100	100	100	100	100
		5. Meningkatnya penyedisan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang memenuhi standar.	g. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU.	40	45	50	55	60
		6. Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah.	h. Nilai LAKIP Perangkat Daerah.	A	A	A	A	A
		a. Program	[1]Indeks Tata Kelola	90	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran Strategis/ Program	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-				
				2026	2027	2028	2029	2030
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Perangkat Daerah (Persentase)					
		b. Program Pengembangan Perumahan	[2]Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	100	100
			[3]Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	100	100	100	100	100
		c. Program Kawasan Permukiman	[4]Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	28	38	48	58	68
		d. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	[5]Persentase kawasan Perumahan di kabupaten/kota ditangani (%)	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
		e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	[6]Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasaranan, Sarana dan Utilitas Umum)	39	40	41	42	43
		f. Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	[7]Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	100	100	100	100	100

Sumber Data: Dokumen Renstra Tahun 2025 – 2029

Tabel 2.1, diuraikan bahwa ada 1 (satu) tujuan dan 6 (enam) sasaran yang mendukung segala capaian visi misi yang ditetapkan melalui dokumen Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029, dan dalam layanannya memiliki 6 (enam) program. Pengukuran capaian kinerja tujuan dan setiap sasaran memiliki masing – masing indikator kinerja sebanyak 4 (empat) butir dan 9 (sembilan) butir untuk dijadikan sarana/ instrument pengukuran. Indikator kinerja mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan.

Dapat dibandingkan melalui dokumen Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026, tujuan dan sasaran sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah dan Indikator berdasarkan Target Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanKabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis/Program	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik dan Tata kelola Pemerintahan		Nilai Lakip OPD	CC	B	B	B	B
		Meningkatnya kualitas kinerja dinas	Nilai Lakip	CC	B	B	B	B
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keungan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Infrastruktur Daerah		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 (sepuluh) Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Rasio rumah layak huni	0,050	0,050	0,053	0,055	0,059
			Persentase jumlah rumah korban bencana yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh	832	830	828	826	824
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasaranan, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026

Tabel 2.2, diketahui 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran dalam memberhasilkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan periode RPJMD Tahun 2021 - 2026. Menggambarkan hasil dari tujuan dan sasaran yang dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya oleh karena adanya indikator kinerja yang dapat diukur dan dinilai. Diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai secara memadai. Pada rencana strategis ini memperoleh kinerja yang sangat baik dari tahun 2023, 2024 dan sampai

tahun 2025. Didukung dengan adanya penetapan dan perumusan yang tepat pada target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal, terukur (kuantitatif dan kualitatif) serta melakukan tahapan perencanaan berkualitas selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Akhirnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan.

Renstra Tahun 2021 – 2026, menerangkan bahwa Indikator kinerja mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan. Secara rinci target indikator kinerja tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan pada periode Tahun 2021-2026 diuraikan sebagaimana tabel berikut. Indikator kinerja utama perangkat daerah terlihat pada tabel 2.2 yakni Rasio rumah layak huni dan jumlah rumah korban bencana yang ditangani.

C. Cascading/ Pohon Kinerja

Pohon kinerja ialah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Penyusunan pohon kinerja ini menguraikan jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan untuk mencapai hasil kinerja (*outcome)*. Selain itu, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai target.

Pohon kinerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 dan dokumen perencanaan tahun 2025. Adapun pohon kinerjanya turut dilampirkan.

D. Rencana Aksi (terlampir)

Rencana Aksi atas perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja, target pertriwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (Outcome). Rencana aksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Nias Selatan turut terlampirkan.

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan, sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan suatu proses memberikan perspektif yang diinginkan untuk pencapaian hasil.

Perencanaan kinerja dilakukan oleh instansi untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Perencanaan kinerja yang telah disusun menjadi pedoman untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang lebih baik. Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 mengacu pada dokumen renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 - 2029. Rencana Kerja Tahun 2025 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan, akan membandingkan perjanjian kerja yang telah ditetapkan tahun 2024 dengan perjanjian kinerja tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas kinerja dinas	Nilai Lakip	Predikat	B
2	Peningkatan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Rasio rumah layak huni	Rasio	0.054
		Persentase jumlah rumah korban bencana yang ditangani	Persen	100

Sumber Data: DPPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Nias Selatan T.A.2024

Berdasarkan tabel 2.3, menunjukkan bahwa pada masing-masing indikator kinerja OPD diharapakan dapat mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, target Jumlah penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah setelah perubahan rencana kerja tahun 2024 menjadi 601 unit. Mencapai target tersebut tidak lepas dari perencanaan kerja dan anggaran dengan skala prioritas.

Indikator kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi, antara lain:

1. Nilai Lakip:

   Dengan predikat B

2. Rasio rumah layak huni:

   $$\frac{Jumlah\ rumah\ layak\ huni}{Jumlah\ penduduk}$$

3. Persentase jumlah rumah korban bencana yang ditangani:

   $$\frac{Jumlah\ rumah\ layak\ huni\ yang\ ditangani}{Target\ rumah\ layak\ huni} x100\%$$

Sedangkan perjanjian kerja perubahan tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2021 - 2026, yang telah dilaksanakan di tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas kinerja dinas	Nilai Lakip	Predikat	B

Sumber Data: Renstra 2021 – 2026

Tabel 2.4, menerangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan didukung oleh 1 (satu) sasaran strategis berikut dengan indikator kinerja.

Berdasarkan Renstra Tahun 2025 – 2029, perjanjian kinerja tahun 2025 tampak pada tabel dibawah ini. Sasaran strategis ini merupakan sasaran yang telah terlaksana yang dijabarkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi MBR maupun msayarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan.	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH.	Persentase	10,56
2.	Meningkatnya akses layanan air minum.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persentase	69,38
3.	Meningkatnya pembangunan jaringan jalan lingkungan yang melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman.	Persentase capaian indikator jaringan jalan lingkungan dalam kondisi baik	Persentase	0
4.	Meningkatnya penyediaan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang memenuhi standar	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU.	Persentase	0
5.	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah.	Nilai LAKIP Perangkat Daerah.	Predikat	A

Sumber Data: Renstra 2025 – 2029

Tabel 2.5, terlihat bahwa ada 5 (lima) sasaran strategis dengan beberapa indikator kinerja mendukung pelaksanaan tujuan, visi dan misi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 dapat dijelaskan, sasaran pelayanan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan dengan indikator yang diperjanjikan berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp.1.940.000.000,00. Pada perjalanan program dan kegiatan kemudian mengalami Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp.1.641.453.865,00. Besaran perubahan anggaran tersebut dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Berdasarkan Sasaran Strategis
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program yang terkait langsung dengan sasaran	Pagu Anggaran (Rp.)
1	Meningkatnya kualitas kinerja dinas	1	372.570.438,00
2	Peningkatan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	3	1.268.883.427,00
Jumlah		4	1.641.453.865,00

Sumber Data: DPPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Nias Selatan T.A. 2025 dan Dokumen Renstra 2021 – 2026.

Sesuai tabel 2.6, terlihat bahwa dari 2 (dua) sasaran strategis memiliki jumlah program yang terlaksana pada tahun anggaran 2025 sebanyak 4 (empat) program yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Penyelarasan penyebaran anggaran masih dalam nomenklatur program yang sama. Dari olahan data diketahui perbandingan capaian sasaran strategis tahun 2025 – 2029, terdistribusi pada 5 (lima) sasaran strategis ke - 1, 3, 4 dan 5 dengan pagu Rp.1.268.883.427,00 dan sasaran strategis ke – 6 dengan besaran alokasi anggaran Rp. 372.570.438, yakni:

1. Sasaran 1, meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi MBR maupun msayarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan dengan indikator kinerja Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (target 10,56%).
2. Sasaran 3, meningkatnya akses layanan air minum. Indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, pada target 69,38%.
3. Sasaran 4, meningkatnya pembangunan jaringan jalan lingkungan yang melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman. Persentase capaian indikator jaringan jalan lingkungan dalam kondisi baik.
4. Sasaran 5, meningkatnya penyediaan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang memenuhi standar. Ada 2 (dua) indikator yang memiliki capaian antara lain: Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU.
5. Sasaran 6, meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah. Indikator Nilai LAKIP Perangkat Daerah tahun 2025 dengan target predikat A.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja terdiri dari dua kata. Akuntabilitas adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sedangkan kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi. suatu instansi pemerintah berorientasi pada anggaran (input), kegiatan (proses), hasil (output) dan manfaat (outcome). Akuntabilitas kinerja merupakan pelaksanaan yang wajib oleh suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan mengacu pada pencapaian misi organisasi yang terukur berdasarkan sasaran/target kinerja yang ditetapkan secara periodik. Keberhasilan itu, bukan pada saat suksesnya menyerap anggaran atau selesainya pekerjaan fisik bangunan dan sarana prasarana tetapi dampak positif yang dirasakan dari manfaat program pemerintah kepada masyarakat atau stakeholdernya.

Sikap akuntabel Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan terwujud dengan mempedomani Renstra periode 2025–2029 yang memuat kondisi ideal berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, menetapkan indikator (ukuran) keberhasilannya serta target kinerja yang akan dicapai.

A. Capaian Kinerja Organisasi/ Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat digambarkan pada skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala pengukuran keberhasilan dalam pencapaian target kinerja

Skala	Kategori
> 100%	Memuaskan
> 85% - 100%	Sangat Baik
> 70% - 85%	Baik
> 50% - 70%	Cukup
> 50%	Kurang

Pengukuran kinerja pada Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan dapat dilakukan pada perjanjian kinerja tahun 2025. Gambaran keberhasilan tercapainya tujuan dan sasaran merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dipresentasikan pada capaian Indikator Kinerja.

Sasaran strategis tahun 2025 – 2029 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan yang telah diintervensi tahun 2025, yakni:

Sasaran 1 : meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi MBR maupun masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan. Capaian indikator kinerjanya (Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH) sebesar 10,56% dari target 10,56%.

Sasaran 3 : meningkatnya akses layanan air minum. Indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak memperoleh capaian 70,10% pada target 69,38%.

Sasaran 4 : meningkatnya pembangunan jaringan jalan lingkungan yang melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman. Persentase capaian indikator jaringan jalan lingkungan dalam kondisi baik sebesar 48,40%.

Sasaran 5 : meningkatnya penyediaan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang memenuhi standar. Ada 2 (dua) indikator yang memiliki capaian antara lain: Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU sebesar 66,04%.

Sasaran 6 : meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah. Indikator Nilai LAKIP Perangkat Daerah tahun 2025 masih berlangsung pada proses penilaian.

Dari sasaran ini menunjukkan gambaran kinerja yang telah dilaksanakan dapat dianalisis, sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan target yang ditetapkan Tahun Anggaran 2025

Tabel 3.2
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi	
		Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	7	**Dokumen**	7	**Dokumen**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1	Laporan
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16**	**Dokumen**	**16**	**Dokumen**
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36	Orang/ bulan	36	Orang/ bulan
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan
10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	Dokumen	1	Dokumen
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	1	Laporan
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1	Dokumen
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**3**	**Dokumen**	**3**	**Dokumen**
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen
14	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen
15	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	Laporan
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**
16	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	1	Dokumen
17	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	1	Dokumen
18	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Orang	1	Orang
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	1	Paket

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi	
		Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Paket	1	Paket
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Paket	1	Paket
22	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Paket	1	Paket
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	Laporan
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Laporan	1	Laporan
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	12	Laporan
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14**	**Unit**	**14**	**Unit**
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	Unit	3	Unit
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11	Unit	11	Unit
II	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**
8	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**3**	**Dokumen**	**3**	**Dokumen**
29	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen
30	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1	Dokumen	1	Dokumen
31	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1	Dokumen	1	Dokumen
III	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**828**	**Ha**	**820,45**	**Ha**
9	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**1**	**Dokumen**	**1**	**Dokumen**
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1	Laporan	1	Laporan
10	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**3**	**Dokumen**	**3**	**Dokumen**
33	Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	3	Dokumen	3	Dokumen
11	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**
34	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	1	Dokumen	1	Dokumen
IV	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**
12	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi	
		Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
35	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1	Dokumen	1	Dokumen
36	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	6	Lokasi	6	Lokasi
37	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	Laporan	1	Laporan

Sumber Data: Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2025 realisasi program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota telah mencapai target sebesar 100%, demikian juga dengan program pengembangan perumahan. Sedangkan realisasi capaian kinerja program kawasan permukiman sampai dengan tahun 2025 sebesar 820.45 Hektar dari 826 Hektar. Program PSU telah terlaksana dengan capaian kinerja 100%.

2. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025

Tabel 3.3
Perbandingan Target berdasarkan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023				Tahun 2024				Tahun 2025			
			Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
			Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keungan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100	%	100	%	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7	Dok	7	Dok	7	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dok	1	Dok	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	1	Dok	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	1	Dok	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok	1	Dok	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023				Tahun 2024				Tahun 2025			
			Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
			Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	1	Dok	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Lap	1	Lap	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Lap	1	Lap	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan**	**16**	**Dok**	**16**	**Dok**	**16**	**Dokumen**	**16**	**Dokumen**	**16**	**Dokumen**	**16**	**Dokumen**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Dok	12	Dok	36	Org/Bln	36	Org/Bln	36	Org/Bln	36	Org/Bln
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	1	Lap	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan
3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dok	1	Dok	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023				Tahun 2024				Tahun 2025			
			Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
			Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	Lap	1	Lap	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dok	1	Dok	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah**	**1**	**Dok**	**1**	**Dok**	**2**	**Dokumen**	**2**	**Dokumen**	**3**	**Dokumen**	**3**	**Dokumen**
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	1	Lap	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase tersedianya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023				Tahun 2024				Tahun 2025			
			Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
			Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Pkt	0	Pkt	0	Pkt	0	Pkt	0	Pkt	0	Pkt
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	Orang	0	Orang	5	Orang	4	Orang	1	Orang	1	Orang
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	Paket	0	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	Paket	0	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	Paket	0	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Pkt	1	Pkt	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Lap	12	Lap	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023				Tahun 2024				Tahun 2025			
			Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
			Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksanaanya layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	100	%	100	Persen	100	Persen	0	Persen	0	Persen
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8	Unit	8	Unit	2	Unit	2	Unit	0	Unit	0	Unit
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100	%	100	%	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Lap	1	Lap	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	12	Lap	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	15	Unit	15	Unit	10	Unit	10	Unit	14	Unit	14	Unit

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023				Tahun 2024				Tahun 2025			
			Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
			Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12	Unit	12	Unit	7	Unit	7	Unit	11	Unit	11	Unit
II	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**
9	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen terlaksananya pendataan, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah kabupaten**	**1**	**Dok**	**1**	**Dok**	**2**	**Dokumen**	**2**	**Dokumen**	**3**	**Dokumen**	**3**	**Dokumen**
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
2	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1	Dok	1	Dok	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023				Tahun 2024				Tahun 2025			
			Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
			Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
III	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Luas kawasan permukiman kumuh**	**830**	**Ha**	**831,92**	**Ha**	**828**	**Ha**	**820,45**	**Ha**	**826**	**Ha**	**820,45**	**Ha**
10	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Tersedianya dokumen regulasi dan SOP penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman**	**0**	**Dokumen**	**0**	**Dokumen**	**1**	**Dokumen**	**1**	**Dokumen**	**1**	**Dokumen**	**1**	**Dokumen**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	0	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan
11	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Jumlah dokumen layanan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha**	**1**	**Dok**	**1**	**Dok**	**1**	**Dokumen**	**1**	**Dokumen**	**3**	**Dokumen**	**3**	**Dokumen**
1	Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview / Terlegalisasi	1	Dok	1	Dok	1	Dokumen	1	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023				Tahun 2024				Tahun 2025			
			Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
			Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
12	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Persentase pelaksanaan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	23	Unit rumah	13	Unit rumah	0	Unit rumah	0	Unit rumah	0	Unit rumah	0	Unit rumah
2	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1	Dok	1	Dok	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
3	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	-	9	Unit	6	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit
IV	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasaranan, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)**	**0**	**%**	**0**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**
13	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase layanan urusan penyelenggaraan PSU Perumahan**	**0**	**%**	**0**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**
1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023				Tahun 2024				Tahun 2025			
			Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
			Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	0	Lokasi	0	Lokasi	12	Lokasi	12	Lokasi	6	Lokasi	6	Lokasi
3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan

Sumber Data: Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026

Pada tabel 3.3, menunjukkan bahwa realisasi program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 dan tahun 2023 sama-sama telah mencapai target sebesar 100%. Demikian juga pencapaian Program pengembangan perumahan sesuai target yang ditetapkan yakni 100%. Sedangkan realisasi capaian kinerja program kawasan permukiman telah diintervensi pada tahun 2023 sebesar 820,45 Hektar dari 830 Hektar, sehingga capaian program Kawasan permukiman dalam menurunkan luasan Kawasan permukiman kumuh dengan progres sampai tahun 2025 tetap sebesar 820,45 Hektar dari target 826 Hektar. Demikian juga dengan program PSU telah terlaksana di tahun 2025 dengan capaian 100% sesuai dengan target.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Rencana Strategis berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, 2024 dan Tahun Anggaran 2025

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dengan Rencana Strategis pada Tahun Anggaran 2023, 2024 dan Tahun Anggaran 2025

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renstra Tahun 2023		Tahun 2023				Renstra Tahun 2024		Tahun 2024				Renstra Tahun 2025		Tahun 2025			
		Target		Target		Realisasi		Target		Target		Realisasi		Target		Target		Realisasi	
		Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	90	%	90	%	90	%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Dok	7	Dok	7	Dok	7	Dok	7	Dok	7	Dok	7	Dok	7	Dok	7	Dok
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16	Dok	16	Dok	16	Dok	16	Dok	16	Dok	16	Dok	16	Dok	16	Dok	16	Dok
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7	Dok	1	Dok	1	Dok	7	Dok	1	Dok	1	Dok	3	Dok	1	Dok	1	Dok
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	0	Unit	0	Unit	0	Unit

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renstra Tahun 2023		Tahun 2023				Renstra Tahun 2024		Tahun 2024				Renstra Tahun 2025		Tahun 2025			
		Target		Target		Realisasi		Target		Target		Realisasi		Target		Target		Realisasi	
		Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
	Pemerintah Daerah																		
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	14	Lap	14	Lap	14	Lap
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16	Unit	15	Unit	15	Unit	16	Unit	15	Unit	15	Unit	14	Unit	14	Unit	14	Unit
II	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**
9	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	7	Dok	1	Dok	1	Dok	7	Dok	2	Dok	2	Dok	3	Dok	3	Dok	3	Dok
III	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**830**	**Ha**	**830**	**Ha**	**820,448**	**Ha**	**828**	**Ha**	**828**	**Ha**	**820,448**	**Ha**	**18**	**%**	**18**	**%**	**18**	**%**
10	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			0	Dok	0	Dok			0	Dok	0	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok
11	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	10	Dok	1	Dok	1	Dok	6	Dok	2	Dok	2	Dok	3	Dok	3	Dok	3	Dok

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renstra Tahun 2023		Tahun 2023				Renstra Tahun 2024		Tahun 2024				Renstra Tahun 2025		Tahun 2025			
		Target		Target		Realisasi		Target		Target		Realisasi		Target		Target		Realisasi	
		Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
12	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
IV	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**100**	**%**	**100**	**%**	**0**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**38**	**%**	**38**	**%**	**38**	**%**
13	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100	%	100	%	0	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%

Sumber Data: Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 (Renstra tahun 2023 s.d 2024) dan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 (Renstra 2025)

Tabel 3.4 ini, menunjukkan bahwa setiap program dan kegiatan rata-rata realisasi capaian kinerjanya dari tahun anggaran 2023, 2024 dan 2025 dibandingkan dengan target renstra tercapai.

Keberhasilan program dari tahun 2023, 2024 dan tahun 2025 tidak terlepas dari indikator kinerja yang ditetapkan setiap tahun sesuai rencana strategis. Dengan demikian, keberhasilan program kerja selama 2 (tiga) tahun terakhir dari 2024 dan 2025 dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dengan Rencana Strategis pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Uraian Program	Indikator Program	Renstra Tahun 2024		Tahun 2024				Indikator Program	Renstra Tahun 2025		Tahun 2025			
			Target		Target		Realisasi			Target		Target		Realisasi	
			Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan		Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keungan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100	%	100	%	100	%	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah	90	%	90	%	90	%
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah	100	%	100	%	100	%	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	%	100	%	100	%
									Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	%	0	%	0	%
3	Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh	828	Ha	826	Ha	820,448	Ha	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	18	%	18	%	18	%

No	Uraian Program	Indikator Program	Renstra Tahun 2024		Tahun 2024				Indikator Program	Renstra Tahun 2025		Tahun 2025			
			Target		Target		Realisasi			Target		Target		Realisasi	
			Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan		Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan	Kinerja	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasaranan, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	100	%	100	%	100	%	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	38	%	38	%	38	%

Sumber Data: Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 (Renstra 2024) dan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 (Renstra 2025)

Tabel 3.5, dapat dijelaskan bahwa tahun 2025 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah mengalami perubahan nomenklatur indikator kinerja dari cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keungan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan menjadi Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Program/ Kegiatan dan Pemanfaatan Sumber Daya

Dengan terlaksananya program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 sampai tahun 2024, telah menjawab dan memenuhi dari target jangka menengah yang ditetapkan di Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 telah mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Nias Selatan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Faktor - faktor keberhasilan program dan kegiatan karena kerjasama yang baik secara internal dan eksternal, ada penerimaan yang baik dari masyarakat pada program dan kegiatan yang dilaksanakan dan dukungan lintas sektoral ditingkat kabupaten dan kecamatan. Akhirnya berdampak positif dan memiliki manfaat serta berdaya ungkit kepada masyarakat Kabupaten Nias Selatan.

Secara terinci keberhasilan program yang terlaksana itu didukung melalui indikator, sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2025, memperoleh capaian 90% dari target 90% sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Ini berarti capaian target jika dibandingkan dengan tahun 2024 mendapatkan hasil yang sama sebesar 100%.
b. Program Pengembangan Perumahan di Tahun 2025 mendapatkan hasil kinerja sebesar 100%, capaian target jika dibandingkan dengan tahun 2024 mendapatkan hasil yang sama sebesar 100%.
c. Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Program Kawasan Permukiman Kumuh di Tahun 2025 mendapatkan hasil persentase Kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota ditangani sebesar 18% pada luas lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Nias Selatan.
d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) telah dilakukan perencanaan sehingga tertuang pada rencana kerja OPD pada tahun 2024, sehingga telah dilaksanakan dengan baik yang berdampak pada aksesibilitas masyarakat di 12 lokasi yang diintervensi, jika dipersentasekan sebesar 100% (dari

target 12 lokasi). Sedangkan untuk Tahun 2025 telah dilaksanakan di 6 (enam) lokasi sesuai rencana strategis yang ditetapkan sebesar 38%, sesuai target pada Renstra 2025-2029. Tentu, program dan kegiatan ini dapat menjadi prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari analisis penggunaan sumber daya yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan telah digunakan secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan dan Standar Operasional Prosedur. Segala sumber daya yang lain telah dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.

Analisis program dan kegiatan telah menunjang keberhasilan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dapat terlihat pada perjanjian kinerja perubahan tahun anggaran 2025 bahwa sebanyak 4 (empat) indikator kinerja telah terlaksana mencapai target yang ditetapkan.

5. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator kinerja daerah ini terlihat pada capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan berdasarkan tujuan/sasaran sesuai pada perjanjian kinerja dari tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan tahun 2025, telah maksimal dilakukan. Adapun hasil capaian kinerja tersebut adalah:

a. Nilai evaluasi Lakip OPD pada tahun 2021 adalah 75,80 dengan kategori Baik. Hal ini berarti bahwa Akuntabiltas Kinerja Internal Pemerintah Daerah telah sesuai dari target yang ditetapkan Tahun 2021. Target nilai evaluasi Lakip tahun 2022 dengan kategori CC dan berdasarkan laporan hasil evaluasi AKIP mendapatkan perolehan nilai 92,29 dengan kategori A yang merupakan pencapaian sangat baik dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan target LAKIP tahun 2023 adalah B dan berdasarkan laporan hasil evaluasi AKIP memperoleh nilai 90,30 dengan kategori A. Pada tahun 2024 ini memiliki target LAKIP pada predikat B. Setelah dianalisa bahwa setiap tahun mengalami peningkatan pencapaian yang sangat baik. Optimis pada tahun ini bisa mendapatkan nilai sesuai target yang ditetapkan.

b. Persentase penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah tahun 2021 sebesar 75,4%. Tahun 2022, cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan mencapai 98,11% dari target 100%. Tahun 2023, hasil kinerja yang diperoleh sebesar 100%. Dan pada tahun 2024 hasil kinerja yang diperoleh 100% sesuai target. Hasil analisa bahwa capaian ini merupakan perolehan hasil yang sangat baik dan mengalami peningkatan pada tahun 2025 sebesar 100%.

c. Berdasarkan data olahan, rasio rumah layak huni tahun 2021 sebanyak 0,049 melebihi dari target 0,048. Rasio rumah layak huni tahun 2022 sebesar 0,110 rasio. Sedangkan rasio rumah layak huni tahun 2023 mencapai 0,108 melebihi target yang ditetapkan 0,052. Diuraikan bahwa nilai rasio ini, didapat pada perbandingan jumlah rumah layak huni 41.200 unit dengan jumlah penduduk (373.674 jiwa). Progres nilai rasio rumah layak huni di tahun 2024 sebesar 0,108. Sampai di tahun 2025 rasio rumah layak huni sebesar 0,14 dari target 0,11 rasio. Menunjukkan bahwa Rasio rumah layak huni mengalami peningkatan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Pada dokumen perencanaan di tahun berikutnya telah tersedia program yang menunjang rasio rumah layak huni.

Tabel 3.6
Capaian Sasaran Indikator Kinerja
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas PKP Kabupaten Nias Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Sampai Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Renstra 2021 – 2026								
1	Peningkatan layanan administrasi menunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten	Nilai Evaluasi LAKIP OPD	B	A	B	A	A	-
		Persentase Penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100
2	Peningkatan kualitas rumah untuk mendukung kualitas kawasan permukiman kumuh	Rasio rumah layak huni	0,052	0,108	0,054	0,108	0,054	0,14
Renstra 2025 – 2029 dan Evaluasi Renja Tahun 2025								
1	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi MBR maupun msayarakat	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH.	-	-	-	-	10,56	10,56

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Sampai Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan.							
2	Meningkatnya penyediaan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang memenuhi standar	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH.	-	-	-	-	37,09	37,09
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU.	-	-	-	-	0	66,04
3	Meningkatnya pembangunan jaringan jalan lingkungan yang melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman.	Persentase capaian indikator jaringan jalan lingkungan dalam kondisi baik	-	-	-	-	0	48,40
4	Meningkatnya akses layanan air minum.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	-	-	-	-	69,38	70,10
5	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah.	Nilai LAKIP Perangkat Daerah.	-	-	-	-	A	

d. Penerimaan bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah telah bertambah pada tahun 2022 sebanyak 329 unit sedangkan tahun 2021 sebanyak 125 unit. Adapun penanganan rumah tidak layak huni yang tertangani di Kecamatan Ulunoyo telah terlaksana rehabilitasinya sebanyak 12 unit yang bersumber dari anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sedangkan unit lainnya bersumber dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sebanyak 50 unit yang tertangani di Kecamatan Teluk Dalam dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 267 dengan rincian 31 unit di Kecamatan Fanayama, 61 unit di Kecamatan Onolalu, 84 unit di Kecamatan Gomo, Mazo sebanyak 44 unit, Idanotae sebanyak 24 unit dan Boronadu sebanyak 23 unit. Hal ini menjadi dampak positif pada pengurangan luas permukiman kumuh tahun 2022 di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Tahun 2023, Jumlah penerimaan bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci. Jumlah penerimaan bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci dengan target 551 KK

pada tahun 2023, sedangkan target pada tahun 2022 sebanyak 501 KK pada dokumen RPJMD Tahu 2021-2026. Ini berarti setiap tahun masyarakat Kabupaten Nias Selatan mendapatkan intervensi bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah sebanyak 50 KK. Namun ketersediaan anggarannya untuk mengintervensi sebanyak 50 KK belum memadai. Akhirnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan menetapkan target sebanyak 20 KK untuk diintervensi, menyesuaikan dari kemampuan keuangan daerah. Sehingga Jumlah penerimaan bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 sebanyak 19 KK. Dengan demikian persentase penerima bantuan rumah layak huni adalah 95%. Semua perencanaan penerima bantuan untuk rumah layak huninya telah terlaksana dengan baik. Capaian indikator kinerja tersebut terlihat pada tabel berikut. Outcome seperti ini yang menjadi harapan masyarakat untuk kemajuan Kabupaten Nias Selatan.

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja berdasarkan
Persentase penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Peningkatan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Persentase penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah	100%	59,70%	100%	95%

e. ASN yang mengikuti diklat teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan. Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis tahun 2023 sebesar 100% dari 2 (dua) orang yang ditargetkan sehingga Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis sebesar 100% dengan kategori tercapai. ASN yang mengikuti diklat teknis tahun 2024 sebanyak 4 (empat) orang dengan capaian 100%. Lalu Tahun 2025, ASN telah mengikuti diklat teknis sebanyak 1 (satu) orang. Indikator ini bertujuan agar setiap ASN dapat meningkatkan pengetahuan dan berkompeten dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Indikator dimaksud dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan berdasarkan Persentase ASN mengikuti Diklat Teknis Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Target	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM	Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis	100%	100%	100%	100%	100%	100%

6. Laporan Hasil Evaluasi AKIP dan Matriks Tindaklanjut Rekomendasi Inspektorat Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indoneisa Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka hasil Evaluasi AKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2023 mendapatkan predikat A dan Tahun 2024 mendapatkan predikat AA terlampir laporan hasil Evaluasi AKIP dan matriks tindaklanjut rekomendasi Inspektorat pada lampiran 9 dan lampiran 10.
7. Grafik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2025.

Grafik 3.1
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2025

Grafik 3.2
Program Pengembangan Perumahan Tahun 2025

Grafik 3.3
Capaian Program Kawasan Permukiman Tahun 2025

Grafik 3.4
Capaian Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Tahun 2025

C. Realisasi Anggaran

Realisasi dan capaian kinerja tahun anggaran 2022 adalah 98,75% pada realisasi anggaran Rp.1.052.463.412,00 dari jumlah perubahan anggaran dengan nilai Rp.1.065.820.001,00. Sedangkan pada tahun 2023 sebesar 99,69% pada realisasi anggaran Rp.1.146.426.388,00 dari total pagu anggaran Rp. 1.150.000.000,00. Untuk tahun 2024 pagu anggaran sebesar Rp. 2.472.640.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 2.410.522.384 dengan persentase 97.49%. Sedangkan uraian realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp.1.621.679.914,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.1.641.453.865,00 dengan persentase 98,80%.

Setiap program terlihat persentase capaian realisasi anggaran tahun 2025 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Perukiman Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut:

a. Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota hasil yang diperoleh 95,71%;
b. Program Pengembangan Perumahan sebesar 100%;
c. Program Kawasan Permukiman sebesar 99,70%;
d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebesar 99,70%.

Dengan terlaksananya program dan kegiatan dari rencana kerja tahun 2022 sampai pada tahun 2025, telah menjawab dan memenuhi dari target jangka menengah yang ditetapkan di Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 telah mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Nias Selatan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Keberhasilan tersebut didapatkan karena kerjasama yang baik secara internal dan eksternal, ada penerimaan yang baik dari masyarakat pada program dan kegiatan yang dilaksanakan dan dukungan lintas sektoral ditingkat kabupaten dan kecamatan. Akhirnya berdampak positif dan memiliki manfaat serta berdaya ungkit kepada masyarakat Kabupaten Nias Selatan.

Akuntabilitas keuangan dimuat pada uraian rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2025, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi Anggaran (Rp.)	Persentase
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**			**95,71%**
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.286.750,00	28.251.750,00	99,88%
2	Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah	40.233.487,00	40.233.000,00	99,99%
3	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	2.989.500,00	2.989.500,00	100,00%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.567.000,00	23.474.200,00	99,61%
5	Admanistrasi Umum Perangkat Daerah	198.443.700,00	197.149.835,00	99,35%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.190.000,00	57.115.760,00	80,23%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.860.000,00	7.390.368,00	94,03%
II	**Program Pengembangan Perumahan**			**100%**
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	11.525.000,00	11.525.000,00	100%
III	**Program Kawasan Permukiman**			**99,70%**
1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	3.055.500,00	3.055.500,00	100%
2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	641.800.000,00	639.837.111,00	99,69%
3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas	5.055.000,00	5.055.000,00	100%

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi Anggaran (Rp.)	Persentase
	dibawah 10 (sepuluh) Ha			
IV	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**			**99,70%**
1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	607.447.928,00	605.602.890,00	99,70%
JUMLAH		**1.641.453.865,00**	**1.621.679.914,00**	**98,80%**

Sumber Data: LRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Nias Selatan T.A. 2025

Tabel 3.9 menunjukkan bahwa kegiatan yang mencapai 100% antara lain Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah, sehingga dapat mempertahankan nilai keberhasilan dari kegiatan tersebut. Sedangkan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebanyak 80,23%. Sehingga berdampak pada pencapaian masing-masing programnya yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten sebesar 95,71%, Program Pengembangan Perumahan sebesar 100%, Program Kawasan Permukiman sebesar 99,70% dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebesar 99,70%. AKhirnya capaian realisasi Anggaran keseluruhan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 adalah 98,80%.

Grafik 3.5
Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2025

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil yang diperoleh dari pengukuran Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara lain Nilai Evaluasi LAKIP OPD dengan kategori AA sedangkan tahun 2025 memiliki target pada kategori A. Kemudian tahun 2025, Persentase Penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah sebesar 100%, Rasio rumah layak huni sampai tahun 2025 sebesar 0,14 ,Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis sebesar 100% dan Persentase penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah sampai Tahun 2025 sebesar 95%.
2. Hasil kinerja berdasarkan realisasi anggaran pada tahun 2025 antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten sebesar 95,71%, Program Pengembangan Perumahan sebesar 100%, Program Kawasan Permukiman sebesar 99,70% dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebesar 99,70%. Total realiasi anggaran Rp. 1.621.679.914 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.641.453.865 atau sebesar 98,80%
3. Adanya sinergitas dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten, walaupun belum optimal.
4. Pengalokasian anggaran pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman belum memadai sehingga perlu melakukan perencanaan program dengan memilih program prioritas, sehingga perencanaan pada RPJMD dan RENSTRA dapat terlaksana dengan optimal.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dapat meningkatkan standar kompetensi pegawai melalui pendidikan/diklat dan seluruh pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan, disiplin dalam melaksanakan tugas/fungsi dan meningkatkan kerjasama yang baik secara internal maupun eksternal untuk mempertahankan kinerja yang lebih baik.
2. Diharapkan kepada perangkat daerah dan instansi-instansi ditingkat provinsi dan pusat, meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dalam memperoleh kemudahan

mendapatkan informasi berupa data terkait sinergitas program pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat yang bermanfaat pada perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

3. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada skala prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah disusun dan disepakati bersama.

Teluk Dalam, 4 Maret 2026

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Nias Selatan,

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN DINAS PKP

FOTUHO LAIA, S.E.
Pembina Tk. I
NIP. 19710223 200112 1 001

LAMPIRAN :

PERJANJIAN KINERJA 2025

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Diponegoro Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Email : perkimnisel@gmail.com
Teluk Dalam (Kode Pos 22865)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **FOTUHO LAIA, S.E.**
   Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan
   Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama : **SOKHIATULO LAIA**
   Jabatan : Bupati Nias Selatan
   Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 14 April 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
SOKHIATULO LAIA	**FOTUHO LAIA, S.E.** Pembina Tk. I NIP. 19710223 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN NIAS SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(5)*
1	Meningkatnya kualitas kinerja dinas	Nilai LAKIP	B

ANGGARAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	Rp. 372.570.438,00	DAU dan SILPA
2	Program pengembangan perumahan	Rp. 11.525.000,00	SILPA
3	Program kawasan permukiman	Rp. 649.910.500,00	SILPA
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 607.447.928,00	PBJT-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain dan SILPA
Jumlah		**Rp. 1.641.453.865,00**	

Teluk Dalam, 14 April 2025

Pihak Kedua,

SOKHIATULO LAIA

Pihak Pertama,

FOTUHO LAIA, S.E.
Pembina Tk. I
NIP. 19710223 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA 2026

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Diponegoro Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Email : perkimnisel@gmail.com
Teluk Dalam (Kode Pos 22865)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **FOTUHO LAIA, S.E.**
   Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan
   Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama : **SOKHIATULO LAIA**
   Jabatan : Bupati Nias Selatan
   Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
SOKHIATULO LAIA	**FOTUHO LAIA, S.E.** Pembina Tk. I NIP. 19710223 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN NIAS SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan	Persentase berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	11 %
		Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana Kabupaten	100 %
2	Meningkatnya penyediaan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang memenuhi standar	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	40 %
3	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	A

ANGGARAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2026

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	Rp. 282.709.000,00	DAU
2	Program pengembangan perumahan	Rp. 12.102.000,00	DAU
3	Program kawasan permukiman	Rp. 472.331.000,00	DAU dan PBJT
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 214.258.000,00	DAU dan PBJT
	Jumlah	**Rp. 981.400.000,00**	

Teluk Dalam, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,

SOKHIATULO LAIA

Pihak Pertama,

FOTUHO LAIA, S.E.
Pembina Tk. I
NIP. 19710223 200112 1 001

CASCADING/POHON KINERJA
TAHUN 2026

LAMPIRAN I
Pohon Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan

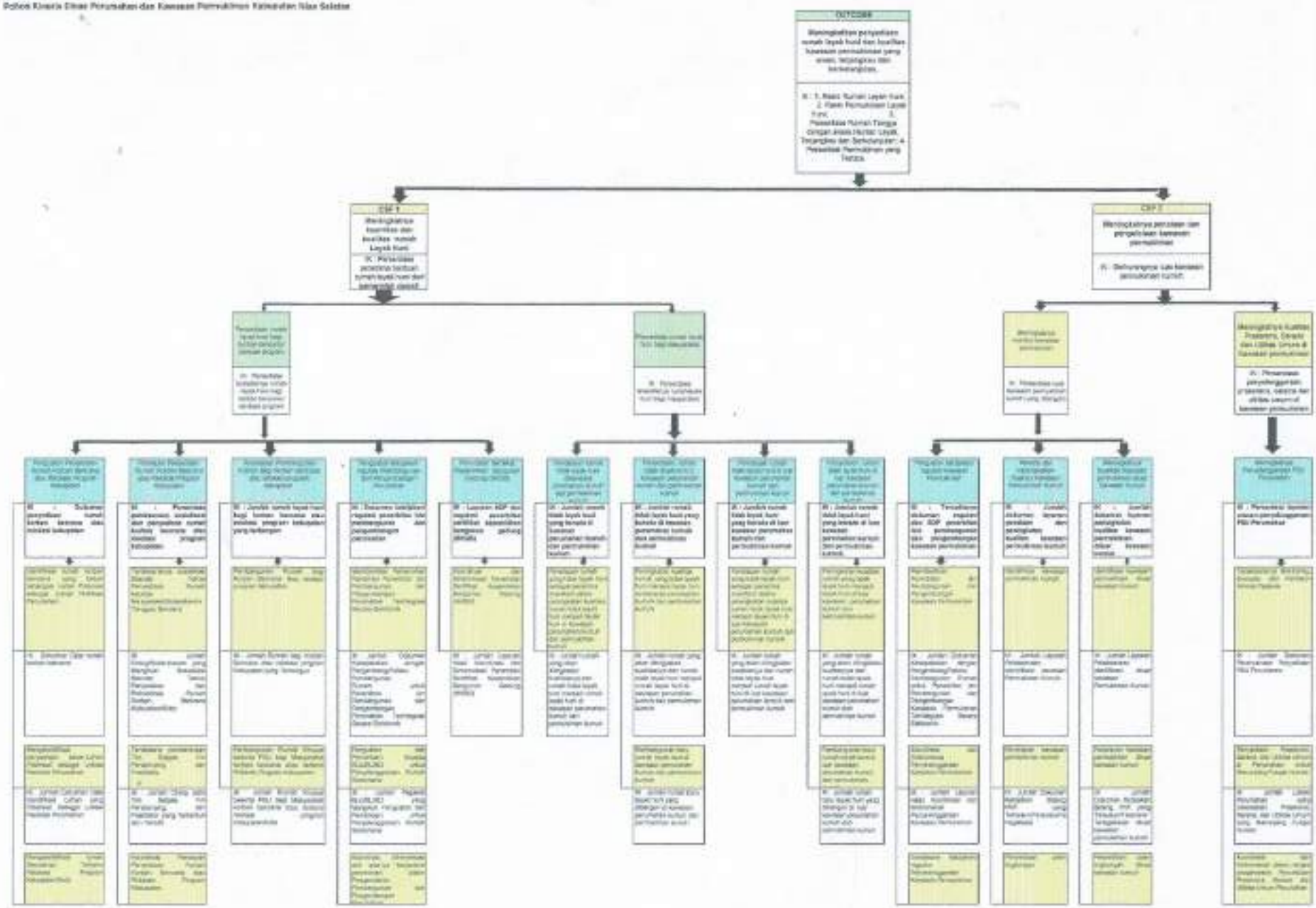

Tahap 6
Mendistribusikan Pohon Kinerja Ke Setiap Jabatan

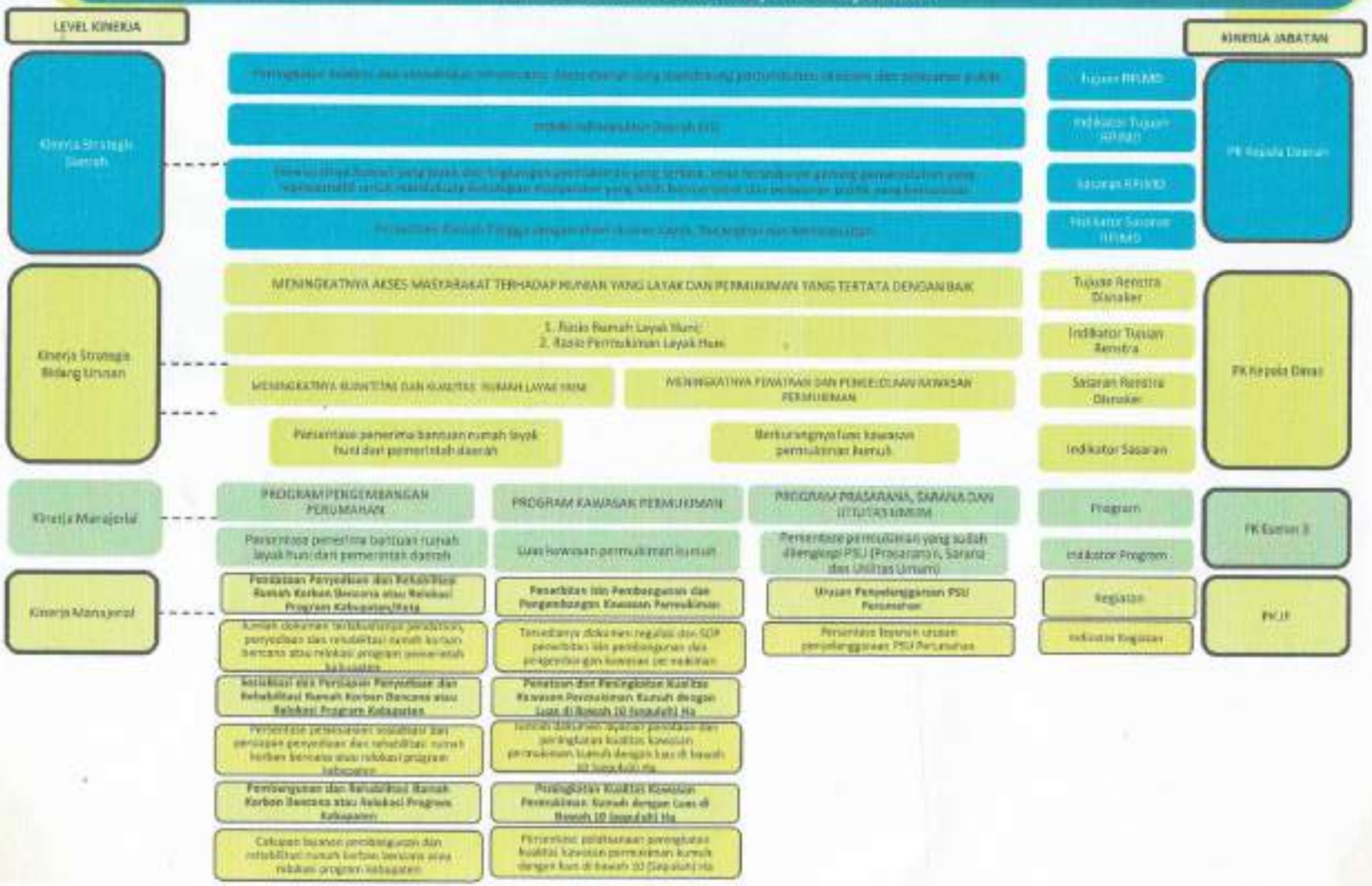

Tahap 6
Mendistribusikan Pohon Kinerja Ke Setiap Jabatan

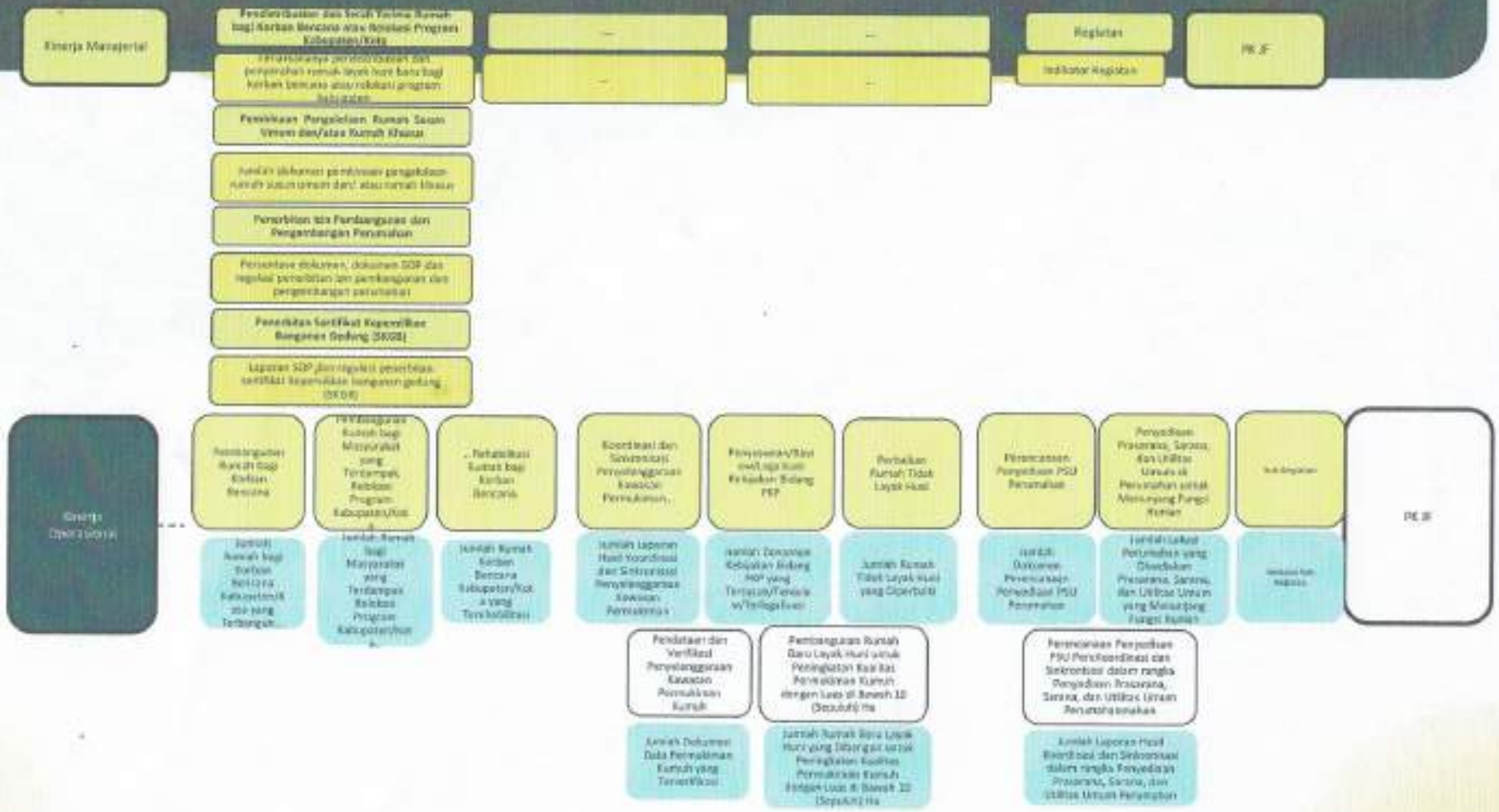

RENJA TAHUN 2025

&

RENJA TAHUN 2026

Lampiran 4

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. NIAS SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**8.750.000.000,00**	**1.940.000.000,00**	**1.641.453.865,00**	**-7.108.546.135,00**							**6.692.054.981,50**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.750.000.000,00**	**1.940.000.000,00**	**1.641.453.865,00**	**-7.108.546.135,00**							**6.692.054.981,50**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**8.750.000.000,00**	**1.940.000.000,00**	**1.641.453.865,00**	**-7.108.546.135,00**							**6.692.054.981,50**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Lakip OPD**				**B 100 Nilai/ Predikat Persen**	**100 B Persen Nilai/ Predikat**	**1.000.000.000,00**	**579.577.500,00**	**372.570.437,50**	**-68.532.268,50**							**931.467.731,50**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan*				7 Dokumen	7 Dokumen	52.500.000,00	34.622.000,00	28.286.750,00	-24.213.250,00			-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	Organisasi Perangkat Daerah		34.622.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	6.064.500,00	3.032.250,00	-4.467.750,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			6.064.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	5.761.000,00	5.761.000,00	-1.739.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			5.761.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	5.750.500,00	5.750.500,00	-1.749.500,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			5.750.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	5.315.500,00	5.315.500,00	-2.184.500,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			5.315.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	5.124.500,00	5.124.500,00	-2.375.500,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			5.124.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	2.984.500,00	1.492.250,00	-6.007.750,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			2.984.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	3.621.500,00	1.810.750,00	-5.689.250,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			3.621.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan*				16 Dokumen	16 Dokumen	93.840.206,00	52.266.050,00	40.233.487,50	-53.606.718,50			-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	Organisasi Perangkat Daerah		46.266.487,50	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	3 Orang/bulan	63.840.206,00	40.200.050,00	34.200.487,50	-29.639.718,50	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			34.200.487,50	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	3.010.000,00	1.505.000,00	-5.995.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			3.010.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	2.852.000,00	1.426.000,00	-6.074.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			2.852.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	3.808.500,00	1.904.250,00	-5.595.750,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			3.808.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	2.395.500,00	1.197.750,00	-6.302.250,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			2.395.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah*				7 Dokumen	7 Dokumen	26.200.000,00	5.979.000,00	2.989.500,00	-23.210.500,00			-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	Organisasi Perangkat Daerah		23.229.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.050.000,00	2.080.000,00	1.040.000,00	-4.010.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			2.080.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.150.000,00	0,00	0,00	-7.150.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			7.150.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			6.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.316.400,00	1.316.000,00	658.000,00	-658.400,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			1.316.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.583.600,00	2.583.000,00	1.291.500,00	-1.292.100,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			2.583.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			2.050.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			2.050.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase tersedianya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	79.225.000,00	65.890.000,00	23.567.000,00	-55.658.000,00			-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	Organisasi Perangkat Daerah		101.115.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	4.225.000,00	0,00	0,00	-4.225.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			4.225.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			1.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	493.000,00	-1.507.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			2.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	907.000,00	-1.093.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			2.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	4 Orang	40.000.000,00	61.890.000,00	22.167.000,00	-17.833.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			61.890.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	384.714.794,00	334.070.450,00	198.443.700,00	-186.271.094,00			-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	Organisasi Perangkat Daerah		361.485.244,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	771.750,00	771.750,00	-2.228.250,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			771.750,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.250.000,00	0,00	0,00	-10.250.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			10.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.956.200,00	4.956.200,00	-43.800,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			4.956.200,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	23.147.000,00	23.147.000,00	8.147.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			23.147.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	12.257.500,00	6.128.750,00	-8.871.250,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			12.257.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			1.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.164.794,00	0,00	0,00	-3.164.794,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			3.164.794,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	319.300.000,00	292.938.000,00	163.440.000,00	-155.860.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			292.938.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			1.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			1.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase terlaksanaanya layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	198.000.000,00	0,00	0,00	-198.000.000,00			-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	Organisasi Perangkat Daerah		198.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	72.000.000,00	0,00	0,00	-72.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			72.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	41.000.000,00	0,00	0,00	-41.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			41.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia*				100 Persen	100 Persen	80.100.000,00	63.900.000,00	71.190.000,00	-8.910.000,00			-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	Organisasi Perangkat Daerah		78.900.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	2.250.000,00	-5.250.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			7.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-1.200.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			2.400.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.000.000,00	54.000.000,00	66.540.000,00	12.540.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			54.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang dipelihara*				16 Unit	16 Unit	85.420.000,00	22.850.000,00	7.860.000,00	-77.560.000,00			-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	Organisasi Perangkat Daerah		87.850.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	12.300.000,00	15.060.000,00	5.020.000,00	-7.280.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			15.060.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	11 Unit	8.120.000,00	7.790.000,00	2.840.000,00	-5.280.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			7.790.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.250.000.000,00**	**23.050.000,00**	**11.525.000,00**	**-21.950.000,00**							**2.228.050.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	120.000.000,00	23.050.000,00	11.525.000,00	-108.475.000,00			-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah	Rumah Korban Bencana atau relokasi		98.050.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	7.935.000,00	3.967.500,00	-11.032.500,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			7.935.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	7.750.000,00	3.875.000,00	-11.125.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			7.750.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																		
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	7.365.000,00	3.682.500,00	-11.317.500,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			7.365.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			12.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			12.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Cakupan layanan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten Persentase pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten*				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah	Masyarakat yang tidak terkena/terkena bencana atau relokasi		60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																		
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				35 Orang	35 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator																		
			Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				20 Orang	20 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan																		
			Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				20 Orang	20 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan				20 Orang	20 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Cakupan layanan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten*				100 Persen	100 Persen	1.746.000.000,00	0,00	0,00	-1.746.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah	Rumah Korban Bencana atau relokasi		1.746.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				25 Unit Rumah	25 Unit Rumah	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				15 Unit Rumah	15 Unit Rumah	660.000.000,00	0,00	0,00	-660.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			660.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan				5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah				6 Rumah Tangga	6 Rumah Tangga	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah				6 Rumah Tangga	6 Rumah Tangga	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				6 Unit Rumah	6 Unit Rumah	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0010	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan				3 Unit Rumah	3 Unit Rumah	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	88.000.000,00	0,00	0,00	-88.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			88.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	88.000.000,00	0,00	0,00	-88.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			88.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pendistribusian dan penyerahan rumah layak huni baru bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten*				3 Laporan	3 Laporan	52.000.000,00	0,00	0,00	-52.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah	Masyarakat yang tidak terkena/terkena bencana atau relokasi		52.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.04.0003	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah				5 Rumah Tangga	5 Rumah Tangga	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.04.0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			1.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			1.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah				45 Rumah Tangga	45 Rumah Tangga	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Jumlah dokumen pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/ atau rumah khusus*				3 Dokumen	3 Dokumen	266.000.000,00	0,00	0,00	-266.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah	Masyarakat yang tidak terkena/terkena bencana atau relokasi		266.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			1.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0003	Pembangunan Rumah Khusus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun				6 Unit	6 Unit	264.000.000,00	0,00	0,00	-264.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			264.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Persentase dokumen, dokumen SOP dan regulasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan*				0 Persen	0 Persen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah	Masyarakat yang ingin membangun dan mengembangkan perumahan		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			1.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0002	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana																		
			Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana				10 Orang	10 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			2.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			1.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			1.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	*Laporan SOP dan regulasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB)*				0 Laporan	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah	-		1.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			1.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Luas kawasan permukiman kumuh**				**826.00 Hektar**	**826.00 Hektar**	**3.750.000.000,00**	**697.372.500,00**	**649.910.500,00**	**-827.627.500,00**							**2.922.372.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	*Tersedianya dokumen regulasi dan SOP penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman*				0 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	6.110.500,00	3.055.500,00	-11.944.500,00			-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah	Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha		11.110.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	6.110.500,00	3.055.500,00	-6.944.500,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			6.110.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah dokumen layanan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha*				7 Dokumen	7 Dokumen	1.600.000.000,00	683.000.000,00	641.800.000,00	-958.200.000,00			-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah	Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha		783.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				15 Dokumen	3 Dokumen	1.500.000.000,00	683.000.000,00	641.800.000,00	-858.200.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			683.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0010	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0011	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha				10 Rumah Tangga	10 Rumah Tangga	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0013	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				10 Rumah Tangga	10 Rumah Tangga	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Persentase pelaksanaan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha*				100 Persen	100 Persen	2.135.000.000,00	8.262.000,00	5.055.000,00	-2.129.945.000,00			-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah	Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha		2.128.262.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				32 Unit Rumah	58 Unit Rumah	640.000.000,00	0,00	0,00	-640.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			640.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU																		
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	8.262.000,00	5.055.000,00	-9.945.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			8.262.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				1 Ha	1 Ha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0011	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali				2 Ha	2 Ha	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				30 Unit	42 Unit	1.320.000.000,00	0,00	0,00	-1.320.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			1.320.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				1 Ha	1 Ha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasaranan, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome) Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)**				**20.00 100 Unit Persen**	**100 20.00 Persen Unit**	**1.750.000.000,00**	**640.000.000,00**	**607.447.927,50**	**-1.139.835.250,00**							**610.164.750,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Persentase layanan urusan penyelenggaraan PSU Perumahan*				100 Persen	100 Persen	1.750.000.000,00	640.000.000,00	607.447.927,50	-1.142.552.072,50			-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah	Lingkungan Hunian penyelenggaraan PSU Perumahan		610.164.750,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	25.600.000,00	24.047.530,00	-40.952.470,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			25.600.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				8 Lokasi	6 Lokasi	1.635.000.000,00	595.200.000,00	565.364.750,00	-1.069.635.250,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			565.364.750,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	19.200.000,00	18.035.647,50	-31.964.352,50	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah			19.200.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	J U M L A H								**8.750.000.000,00**	**1.940.000.000,00**	**1.641.453.865,00**	**-7.108.546.135,00**							**6.692.054.981,50**	

Tabel 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. NIAS SELATANTAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**4.400.000.000,00**							**4.400.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.887.383.671,00**							**3.887.383.671,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**3.887.383.671,00**							**3.887.383.671,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**	**-**			**-**	**537.289.350,00**						**-**	**537.289.350,00**	
		[Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah]	**Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota** **Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni**	**100**	**0** **100**	**0** **100**	**100**	**537.289.350,00**	-	-	-	-	-	-	**537.289.350,00**	-
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	32.289.350,00			-	-	-	-	32.289.350,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan														
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	9.096.450,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.096.450,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani														
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	9.096.450,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.096.450,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana														
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	9.096.450,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.096.450,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	-	5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator														
			Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				20 Orang	3.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				20 Orang	2.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	500.000.000,00			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				10 Unit Rumah	250.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				5 Unit Rumah	250.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**	**-**			**-**	**2.014.372.500,00**						**-**	**2.014.372.500,00**	
		[Meningkatnya kualitas kawasan permukiman]	**Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani**	**68**	**8**	**18**	**28**	**2.014.372.500,00**	-	-	-	-	-	-	**2.014.372.500,00**	-
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-			-	6.110.500,00			-	-	-	-	6.110.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	6.110.500,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.110.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	2.008.262.000,00			-	-	-	-	2.008.262.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				36 Unit Rumah	900.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh														
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	8.262.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.262.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				22 Unit	1.100.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**-**	**-**			**-**	**1.335.721.821,00**						**-**	**1.335.721.821,00**	
		[Meningkatnya penyediaan PSU permukiman]	**Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**	**43**	**37.09**	**38**	**39**	**1.335.721.821,00**	-	-	-	-	-	-	**1.335.721.821,00**	-
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-			-	1.335.721.821,00			-	-	-	-	1.335.721.821,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	49.933.526,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		49.933.526,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	37.450.145,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		37.450.145,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				7 Lokasi	1.248.338.150,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.248.338.150,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X	**NON URUSAN**						**512.616.329,00**							**512.616.329,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**512.616.329,00**							**512.616.329,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**512.616.329,00**						**-**	**512.616.329,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**512.616.329,00**	-	-	-	-	-	-	**512.616.329,00**	-
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	34.622.000,00			-	-	-	-	34.622.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	6.064.500,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.064.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.761.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.761.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.750.500,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		5.750.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.315.500,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.315.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.124.500,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.124.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.984.500,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.984.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3.621.500,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.621.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	52.266.050,00			-	-	-	-	52.266.050,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3 Orang/bulan	40.200.050,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.200.050,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.010.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.010.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	2.852.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.852.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	3.808.500,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.808.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.395.500,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.395.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	4.663.000,00			-	-	-	-	4.663.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.080.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.080.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2.583.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.583.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	65.890.000,00			-	-	-	-	65.890.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	61.890.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		61.890.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	333.298.700,00			-	-	-	-	333.298.700,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.956.200,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.956.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	23.147.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		23.147.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12.257.500,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.257.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan Laporan	292.938.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		292.938.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	9.900.000,00			-	-	-	-	9.900.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2.400.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.400.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	11.976.579,00			-	-	-	-	11.976.579,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	11.100.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		11.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	876.579,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		876.579,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	J U M L A H							**4.400.000.000,00**							**4.400.000.000,00**	

RENCANA AKSI TAHUN 2025

Lampiran 5

RENCANA AKSI TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NIAS SELATAN

No	TUJUAN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	TARGET		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Akhir	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		RENCANA AKSI	TARGET(TRWULAN)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
I	Meningkatkan penyediaan rumah layak huni dan kualitas kawasan permukiman yang aman, terjangkau dan berkelanjutan.		Rasio Rumah Layak Huni	0,11	Rasio											√		
			Rasio Permukiman Layak Huni	0,14	Rasio											√		
			Persentasi Permukiman yang Tertata	37,08	%											√		
			Persentase Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	12,58	%											√		
		Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah.	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A	Predikat													√
1						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah	80	%						√	√	√	√
										Perencanaan, Pengunggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7	Dok					
1										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dok	Menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan dengan berpedoman pada Renstra 2021 - 2026		√	√	
2										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dok	Menyusun Dokumen RKA-SKPD dengan mempedomani plafon anggaran yang telah disepakati, mencantumkan sumber dana, lokasi kegiatan, capaian program kegiatan,sasaran kegiatan serta mempertimbangkan rencana anggaran kas setiap kegiatan				√
3										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	Menyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD mempedomani plafon anggaran yang telah disepakati, mencantumkan sumber dana, lokasi kegiatan, capaian program kegiatan,sasaran kegiatan serta mempertimbangkan rencana anggaran kas setiap kegiatan			√	
4										Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok	Menyusun dan menentak DPA-SKPD melalui aplikasi SIPD				√

No	TUJUAN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	TARGET		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Akhir	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		RENCANA AKSI	TARGET(TRWULAN)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
5										Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	Menyusun dan merevisi/di Perubahan DPA-SKPD melalui aplikasi SIPD			√	
6										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Lap	Menyusun dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Nias Selatan	√			
7										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Lap	Menyusun evaluasi kinja triwulan I,II,III dan IV	√	√	√	√
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan**	**10**	**Dok**					
1										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3	Org/Bln	Melakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	√	√	√	√
2										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	Menyiapkan LRA, LPE, LO dan rekonsiliasi asset sebagai bahan penyusunan CALK				√
3										Pengaktifan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dok	Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan	√	√		
4										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Lap	Menyediakan laporan keuangan setiap bulan/triwulan/semesteran untuk bahan koordinasi	√	√	√	√
5										Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dok	Menyiapkan dokumen laporan dan analisis prognosis untuk realisasi anggaran	√	√	√	√
										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah**	**7**	**Dok**					
1										Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	Menyusun rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		√		
2										Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pelbinaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	1	Lap	Menyusun Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				√
3										Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	Menyusun Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				√

No	TUJUAN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	TARGET		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Akhir	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		RENCANA AKSI	TARGET(TRIWULAN)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase tersedianya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**%**					
1										Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dok	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		√		√
2										Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	1	Dok	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		√		√
3										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4	Orang	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			√	
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**					
1										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	Menyediakan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	√	√	√	√
2										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	Menyediakan peralatan rumah tangga	√	√	√	√
3										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	Paket	Menyediakan bahan logistik kantor berupa ATK dan makanan serta minuman rapat	√	√	√	√
4										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Menyediakan barang cetakan dan penggandaan	√	√	√	√
5										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Lap	Melaksakan rapat dan koordinasi baik didalam daerah maupun luar daerah	√	√	√	√
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**					
1										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	Lap	Menyediakan materai dan benda pos lainnya	√	√	√	√
2										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Lap	Menyediakan jasa internet setiap bulan (indihome)	√	√	√	√
3										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Lap	Menyediakan jasa pelayanan umum kantor	√	√	√	√
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**14**	**Unit**					

No	TUJUAN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	TARGET		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Akhir	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		RENCANA AKSI	TARGET(TRWULAN)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
1										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	Memelihara dan melakukan pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	√	√	√	√
2										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	11	Unit	Melakukan pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	√	√	√
0		Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi MBR maupun masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan.	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH.	10,56	%													√
			Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota.	0	%													√
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota.	100	%													√
2						PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	%						√	√	√	√
							Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	0	%						√	√	√	√
										Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	**Jumlah dokumen terlaksananya pendataan, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah kabupaten**	**3**	**Dok**					
1										Identifikasi Lokasi-Lokasi Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1	Dok	Menganalisa Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	√	√		√
2										Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1	Dok	Menganalisa Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	√	√		√

No	TUJUAN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	TARGET		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Akhir	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		RENCANA AKSI	TARGET(TRWULAN)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
9										Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1	Dok	Mendata Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	√		√	
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani.	15,85	%													√
3						PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	15	%						√	√	√	√
										Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Tersedianya dokumen regulasi dan SOP penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	1	Dok					
1										Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1	Lap	Mengkoordinir penyusunan dokumen kebijakan Bidang PKP yang tersusun/terreview terlegalisasi		√		√
										Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksanaanya jumlah dokumen layanan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	3	Dok					
1										Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah dokumen kebijakan Bidang PKP yang tersusun/terreview terlegalisasi	3	Dok	Mengkoordinir penyusunan dokumen kebijakan Bidang PKP yang tersusun/terreview terlegalisasi		√		√
										Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase pelaksanaan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	100	%					
1										Pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh	Jumlah dokumen data permukiman kumuh yang terverifikasi	1	Dok	Melaksanakan dan menyusun dokumen data permukiman kumuh yang terverifikasi	√		√	
10		Meningkatnya akses layanan air minum.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	88,18	%													√

No	TUJUAN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	TARGET		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Akhir	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		RENCANA AKSI	TARGET(TRWULAN)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
		Meningkatnya pembangunan jaringan jalan lingkungan yang melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman.	Persentase jaringan jalan lingkungan dalam kondisi baik.	0,00	%													√
		Meningkatnya penyediaan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang memenuhi standar.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU.	0,00	%													√
4						PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	30	%									
										Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase layanan urusan penyelenggaraan PSU Perumahan	100	%					
1										Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1	Dok	Mengkoordinasikan penentuan lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi hunian		√		
2										Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi hunian	5	Lokasi	Mengkoordinasikan penentuan lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi hunian		√		√
3										Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	Lap	Mengkoordinasikan penentuan lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi hunian			√	

Teluk Dalam, 28 Oktober 2025

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan,

FOTURO LAIA, S.E.
Pembina Tk. I
NIP. 198710223 200112 1 001

LAPORAN MONITORING

&

EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2025

Lampiran 8

DOKUMEN LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target			Capaian		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target			Capaian		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target			Capaian	
	Meningkatkan penyediaan rumah layak huni dan kualitas kawasan permukiman yang aman, terjangkau dan berkelanjutan.		Rasio Rumah Layak Huni	TW II	0,11	Rasio	0,11	Rasio														
			Rasio Permukiman Layak Huni	TW II	0,14	Rasio	0,14	Rasio														
			Persentasi Permukiman yang Tertata	TW II	37,09	%	37,09	%														
			Persentase Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	TW II	12,5	%	0	%														
1		Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah.	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	TW IV	A	Predikat		Predikat														
									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah	TW I	40	%	0	%						
											TW II	10	%	0	%							
											TW III	10	%	10	%							
											TW IV	30	%	60	%							
																Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	TW I	3	Dok	3	Dok
																		TW II	4	Dok	-	Dok
																		TW III	-	Dok	3	Dok
																		TW IV	-	Dok	1	Dok
																Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	TW I	1	Dok	-	Dok

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Capaian	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Capaian	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target			Capaian	
														TW II	4	Dok	3	Dok
														TW III	5	Dok	5	Dok
														TW IV	6	Dok	8	Dok
												Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	TW I	-	Dok	-	Dok
														TW II	1	Dok	-	Dok
														TW III	-	Dok	1	Dok
														TW IV	2	Dok	2	Dok
												Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	TW I	-	%	25	%
														TW II	50	%	-	%
														TW III	50	%	-	%
														TW IV	-	%	75	%
												Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	TW I	25	%	25	%
														TW II	25	%	19	%
														TW III	25	%	28	%
														TW IV	25	%	28	%
												Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	TW I	25	%	20	%
														TW II	25	%	21	%
														TW III	25	%	25	%
														TW IV	25	%	34	%
												Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	TW I	4	Unit	-	Unit
														TW II	1	Unit	-	Unit
														TW III	6	Unit	11	Unit
														TW IV	3	Unit	3	Unit
2		Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi MBR maupun masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan.	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH.	TW IV	10,56	%	10,56	%										

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Capaian		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Capaian		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target			Capaian	
			Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	TW IV	0	%	0	%												
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	TW IV	100	%	0	%												
									PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	TW III	100	%	100	%						
										Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	TW I-IV	0	%	0	%						
															Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen terlaksananya pendataan, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah kabupaten	TW I	-	Dok	-	Dok
																	TW II	1	Dok	-	Dok
																	TW III	1	Dok	3	Dok
																	TW IV	1	Dok	-	Dok
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	TW IV	15,85	%	15,85	%												
									PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	TW IV	18	%	18,0	%						

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Capaian		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Capaian	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target			Capaian	
													Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Jumlah dokumen Tersedianya regulasi dan SOP penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	TW I	1	Dok	-	Dok
															TW II	-	Dok	-	Dok
															TW III	-	Dok	1	Dok
															TW IV	-	Dok	-	Dok
													Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya jumlah dokumen layanan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	TW I	-	Dok	-	Dok
															TW II	1	Dok	-	Dok
															TW III	1	Dok	3	Dok
															TW IV	1	Dok	-	Dok
													Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase pelaksanaan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	TW I	25	%	-	%
															TW II	25	%	-	%
															TW III	25	%	25	%
															TW IV	25	%	75	%
		Meningkatnya akses layanan air minum.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	TW I-IV	68,36 %	70,10 %													
		Meningkatnya pembangunan jaringan jalan lingkungan yang melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman.	Persentase jaringan jalan lingkungan dalam kondisi baik.	TW IV	0 %	48,40 %													
		Meningkatnya penyediaan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang memenuhi standar.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU.	TW IV	0 %	66,04 %													

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Capaian	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target			Capaian		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target			Capaian	
							PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase pemukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	TW I	9,5	%	-	%							
									TW II	9,5	%	-	%							
									TW III	9,5	%	28,5	%							
									TW IV	9,5	%	9,5	%							
														Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase layanan urusan penyelenggaraan PSU Perumahan	TW I	25	%	-	%
																TW II	25	%	-	%
																TW III	25	%	75	%
																TW IV	25	%	25	%

Teluk Dalam, 09 Januari 2026

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan

FOTURO LAIA, S.E.
Pembina Tk. I
NIP. 19870223 200112 1 001

RENCANA AKSI TAHUN 2026

Lampiran 7

RENCANA AKSI TAHUN 2026
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NIAS SELATAN

No	TUJUAN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	TARGET		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Akhir	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		RENCANA AKSI	TARGET(TRIWULAN)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
1	Meningkatkan penyediaan rumah layak huni dan kualitas kawasan permukiman yang aman, terjangkau dan berkelanjutan.		Rasio Rumah Layak Huni	0,11	Rasio													√
			Rasio Permukiman Layak Huni	0,14	Rasio													√
			Persentase Permukiman yang Tertata	27,09	%													√
			Persentase Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	72,91	%													√
		meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah	Nilai LKKIP Pemerintah Daerah	B	Predikat										√			√
1						PROGRAM PEMENUHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Tata Kelola Pemerintah Daerah	80	%						√	√	√	√
										Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7	Dok					
1										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dok	Menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang diserta indikator kinerja dan pendanaan dengan berpedoman pada Renstra 2021 - 2026		√	√	
2										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	Menyusun Dokumen RKA-SKPD dengan memperhatikan plafon anggaran yang telah disepakati, mencantumkan sumber dana, lokasi kegiatan, capaian program kegiatan,sasaran kegiatan serta memperhitungkan rencana anggaran kas setiap kegiatan				√
3										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	Menyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD memperhatikan plafon anggaran yang telah disepakati, mencantumkan sumber dana, lokasi kegiatan, capaian program kegiatan,sasaran kegiatan serta memperhitungkan rencana anggaran kas setiap kegiatan			√	
4										Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok	Menyusun dan mencetak DPA-SKPD melalui aplikasi SIPD				√

No	TUJUAN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	TARGET		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Akhir	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		RENCANA AKSI	TARGET(TRIWULAN)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
5										Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	Menyusun dan mencatat Perubahan DPA-SKPD melalui aplikasi SIPD			√	
6										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Lap	Menyusun dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan	√			
7										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Lap	Menyusun evaluasi kinerja triwulan III/II dan IV	√	√	√	√
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan**	**16**	**Dok**					
1										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8	Org/Min	Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	√	√	√	√
2										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	Menyiapkan LRA, LPE, LO dan rekonsiliasi aset sebagai bahan penyusunan CALK				√
3										Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dok	Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan	√	√		
4										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Lap	Menyediakan laporan keuangan setiap bulan/triwulan/semesteran untuk bahan koreksi	√	√	√	√
5										Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dok	Menyiapkan dokumen laporan dan analisis prognosis untuk realisasi anggaran	√	√	√	√
										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah**	**7**	**Dok**					
1										Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	Menyusun rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		√		
2										Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	Menyusun Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				√

No.	TUJUAN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	TARGET		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Akhir	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		RENCANA AKSI	TARGET(TRWIJLAN)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	%					
1										Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dok	Melakukan koordinasi, pemutakhiran dan verifikasi data pegawai, serta penginpulan data ke dalam sistem informasi kepegawaian agar data akurat dan terintegrasi.		√		√
2										Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	1	Dok	Melakukan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		√		√
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100	%					
1										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	Menyediakan peralatan rumah tangga	√	√	√	√
2										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	Paket	Menyediakan bahan logistik kantor berupa ATK dan makanan serta minuman rapat	√	√	√	√
3										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Menyediakan barang cetakan dan penggandaan	√	√	√	√
4										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Lap	Melakukan rapat dan koordinasi baik didalam daerah maupun luar daerah	√	√	√	√
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Lap					
1										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	Lap	Menyediakan materai dan benda pos lainnya	√	√	√	√
2										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Lap	Menyediakan jasa internet setiap bulan (indihome)	√	√	√	√
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	8	Unit					
1										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Peridinannya	3	Unit	Memelihara dan melakukan pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	√	√	√	√
II			Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH.	11	%													√

No	TUJUAN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	TARGET		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Akhir	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		RENCANA AKSI	TARGET(TRIWULAN)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
		Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi MBR maupun masyarakat yang mendapat keterbatasan akses pembiayaan	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	%													
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	%													
2						PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang menggunakan rumah layak huni (%)	100	%									
							Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	100	%									
										Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah dokumen terlaksananya pendataan, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah kabupaten	1	Dok					
1										Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1	Dok	Mengumpulkan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				
2										Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	Dok	Melakukan pendataan, pemetaan, dan verifikasi perumahan yang berada di kawasan rawan bencana				
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	20	%													
3						PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/Kota ditangani (%)	20	%									
										Penyelesaian izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Tersedianya dokumen regulasi dan SOP penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	1	Dok					
1										Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1	Lap	Melakukan koordinasi lintas sektor untuk menyelesaikan penyelenggaraan kawasan permukiman				

No	TUJUAN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	TARGET		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Akhir	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		RENCANA AKSI	TARGET(TRIWULAN)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
										Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase pelaksanaan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	100	%					
1										Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	10	Unit	Melaksanakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sesuai standar kelayakan huni		√		√
2										Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1	Dok	Melaksanakan dan menyusun dokumen data permukiman kumuh yang terverifikasi				
3										Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	4	Unit	Melaksanakan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	√		√	
0		Meningkatnya akses layanan air minum.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	70.00	%											√		
		Meningkatnya pembangunan jaringan jalan lingkungan yang melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman.	Persentase jaringan jalan lingkungan dalam kondisi baik.	100.00	%											√		
		Meningkatnya penyediaan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang memenuhi standar.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU.	40.00	%												√	
4						PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	38	%									
										Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase layanan urusan penyelenggaraan PSU Perumahan	100	%					
1										Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1	Dok	Mengkoordinasikan penentuan lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi hunian		√		
2										Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	Lap	Mengkoordinasikan penentuan lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi hunian			√	

No	TUJUAN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	TARGET		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Akhir	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		RENCANA AKSI	TARGET(TRIWULAN)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
1										Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah lokasi pekarangan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1	Lokasi	Mengkoordinasikan penentuan lokasi pekarangan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi hunian			√	

Teluk Dalam, 7 Januari 2026

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Nias Selatan,

FOTEHO LAIA, S.E.
Pembina Tkt I
NIP. 196710223 200112 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Diponegoro Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Email: perkimnisel@gmail.com
Teluk Dalam (Kode Pos 22865)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR: 600.2/13 /DPKP/A/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN NIAS SELATAN,

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali), terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan;
23. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 72 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, serta pengukuran dan pelaporan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan;

KETIGA : Perubahan IKU dapat dilakukan apabila terjadi penyesuaian kebijakan, struktur organisasi, atau perubahan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
Pada Tanggal : 09 Januari 2026

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Nias Selatan,

FOTUHO LAIA, S.E.
Pembina Tk. I
NIP. 19710223 200112 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 600.2/ . /DPKP/A/2026
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama				Sumber Dana	Penanggung Jawab	Keterangan
		Uraian Indikator Kinerja	Deskripsi Indikator Kinerja	Formula	Satuan			
1		Rasio rumah layak huni	Perbandingan antara jumlah rumah yang memenuhi standar layak huni terhadap jumlah penduduk, biasanya dihitung dalam satuan rasio	Proporsi rumah yang layak huni dalam suatu wilayah atau populasi	Rasio	DAU	DPKP	
2		Rasio Permukiman Layak Huni	Perbandingan antara jumlah kawasan permukiman yang memenuhi kriteria layak huni, dilihat dari ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar, terhadap keseluruhan kawasan permukiman dalam suatu wilayah.	Proporsi jumlah kawasan permukiman yang memenuhi kriteria layak huni dibandingkan dengan total kawasan permukiman di suatu wilayah.	Rasio	DAU	DPKP	
3		Persentasi Permukiman yang Tertata	Indikator yang menggambarkan tingkat kawasan permukiman yang telah ditata melalui kegiatan peningkatan kualitas lingkungan, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta penataan bangunan sesuai rencana tata ruang dan ketentuan teknis yang berlaku dalam suatu periode dan wilayah tertentu.	Persentase luas atau jumlah kawasan permukiman yang telah ditata sesuai standar teknis dibandingkan dengan total luas atau jumlah kawasan permukiman yang menjadi sasaran penataan pada periode yang sama.	%	DAU	DPKP	
4		Persentase Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Indikator yang menggambarkan persentase rumah tangga yang menempati hunian yang memenuhi persyaratan kelayakan bangunan, memiliki akses terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum, biaya hunian yang terjangkau sesuai kemampuan rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial di suatu wilayah.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian yang memenuhi kriteria layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan dibandingkan dengan total jumlah rumah tangga di wilayah yang bersangkutan.	%	DAU	DPKP	
5	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi MBR maupun masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan.	Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Indikator yang menggambarkan tingkat penurunan jumlah Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan kriteria teknis kelayakan rumah (keselamatan bangunan, kecukupan luas, kesehatan, dan ketahanan struktur) dalam satu periode pelaporan pada suatu wilayah.	Persentase penurunan jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang dihitung dari selisih jumlah RTLH pada awal periode dengan jumlah RTLH pada akhir periode, kemudian dibandingkan dengan jumlah RTLH pada awal periode di wilayah yang sama.	%	DAU	DPKP	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama				Sumber Dana	Penanggung Jawab	Keterangan
		Uraian Indikator Kinerja	Deskripsi Indikator Kinerja	Formula	Satuan			
6		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Indikator yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana melalui pembangunan baru dan/atau rehabilitasi rumah rusak sesuai standar teknis keselamatan, kesehatan, dan kelayakan fungsi hunian dalam suatu periode dan wilayah tertentu.	Persentase jumlah rumah korban bencana yang telah dibangun atau direhabilitasi hingga memenuhi standar layak huni dibandingkan dengan total kebutuhan rumah korban bencana yang telah ditetapkan dalam data resmi pemerintah daerah pada periode yang sama	%	DAU	DPKP	
7		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Indikator yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi akibat pelaksanaan program pemerintah daerah, sesuai standar kelayakan bangunan, akses prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam satu periode dan wilayah tertentu.	Persentase jumlah masyarakat terdampak relokasi yang telah difasilitasi dan menempati rumah layak huni dibandingkan dengan total jumlah masyarakat terdampak relokasi yang telah ditetapkan dalam data resmi pemerintah daerah pada periode yang sama.	%	DAU	DPKP	
8	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman.	Persentase kawasan Permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Indikator yang menggambarkan tingkat penanganan kawasan kumuh dengan luas kurang dari 10 ha melalui kegiatan peningkatan kualitas permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam satu periode dan wilayah tertentu.	Persentase luas kawasan Permukiman kumuh di bawah 10 ha yang telah ditangani melalui kegiatan peningkatan kualitas dibandingkan dengan total luas kawasan Permukiman kumuh di bawah 10 ha yang telah ditetapkan dalam surat keputusan kepala daerah pada periode yang sama.	%	DAU PBJT	DPKP	
9	Meningkatnya penyediaan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang memenuhi standar.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung PSU	Indikator yang menggambarkan tingkat lingkungan permukiman yang telah didukung oleh ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) sehingga memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai ketentuan teknis yang berlaku dalam suatu wilayah dan periode tertentu.	Persentase jumlah atau luas lingkungan permukiman yang telah memiliki dukungan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai standar dibandingkan dengan total jumlah atau luas lingkungan permukiman yang menjadi sasaran pada periode yang sama.	%	DAU	DPKP	
10	Meningkatnya pembangunan jaringan jalan lingkungan yang melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	Persentase Jaringan Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik	Indikator yang menggambarkan tingkat kualitas jaringan jalan lingkungan pada kawasan permukiman yang berada dalam kondisi baik dan dapat berfungsi optimal sesuai standar teknis yang berlaku dalam suatu periode dan wilayah tertentu.	Persentase panjang jaringan jalan lingkungan yang berada dalam kondisi baik dibandingkan dengan total panjang jaringan jalan lingkungan yang ada di wilayah tersebut pada periode yang sama.	%	DAU	DPKP	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama				Sumber Dana	Penanggung Jawab	Keterangan
		Uraian Indikator Kinerja	Deskripsi Indikator Kinerja	Formula	Satuan			
11	Meningkatnya akses layanan air minum	Persentase rumah tangga (RT) yang memiliki akses terhadap Sumber air minum layak	Indikator yang menggambarkan tingkat rumah tangga yang memperoleh akses terhadap sumber air minum layak sesuai standar kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan, baik melalui jaringan perpipaan maupun non-perpipaan yang memenuhi ketentuan yang berlaku, dalam suatu wilayah dan periode tertentu.	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak dibandingkan dengan total jumlah rumah tangga di wilayah yang sama pada periode pelaporan.	%	DAU	DPKP	
12	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indikator yang menunjukkan tingkat akuntabilitas dan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja yang dinilai melalui evaluasi resmi oleh instansi berwenang dalam suatu periode tertentu.	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh instansi pembina atau evaluator yang berwenang pada periode penilaian tertentu.	Predikat	DAU	DPKP	

Teluk Dalam, 9 Januari 2026

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan,

FOTUHO LAIA, S.E.
Pembina Tk. I
NIP. 198710223 200112 1 001

LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP

T.A 2024

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Arah Lagundri Km. 7 Telukdalam – Kode Pos 22865
Email : inspektoratkab.nisel@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NIAS SELATAN TA. 2024

Nomor : 700.1.2.1/ 144 /ITDA/III/2025
Tanggal : 21 Maret 2025

1. Pendahuluan
   a. Dasar Hukum Evaluasi
      1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
      2. Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (PKP2T) Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.
   b. Latar Belakang Evaluasi

      Dalam rangka meningkatkan Pelaksanaan Pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

   c. Tujuan evaluasi
      1) Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem SAKIP;
      2) Menilai Tingkat implementasi SAKIP;
      3) Menilai Tingkat akuntabilitas kinerja;

Dipindai dengan CamScanner

4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi;

5) Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK).

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:

a) Perencanaan Kinerja;

b) Pengukuran Kinerja;

c) Pelaporan Kinerja;

d) Evaluasi Kinerja, dan

e) Capaian Kinerja.

f) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024,

Dokumen yang dievaluasi meliputi Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

f. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/Unit Kerja.

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 ini merupakan tanggungjawab tertulis atas penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel dan Transparan dan untuk mewujudkan penerapan Prinsip Tata Kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan dokumen LAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga dapat menjadi tolok ukur dalam meningkatkan kinerja Instansi pemerintah dan bahan dalam perbaikan terhadap kinerja yang masih belum dicapai.

g. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2023 telah dilaksanakan.

Dipindai dengan CamScanner

2. Hasil Evaluasi

a. Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan memperoleh nilai sebesar **95,58 (AA)** dengan interpretasi **"Sangat Memuaskan".** Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan dengan rincian sebagai berikut :

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja dengan nilai sebesar 29,64 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00 atau 98,8% dengan kategori peringkat AA (memuaskan).

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja dengan nilai sebesar 24,38 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 25,00 atau 97,52 % dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat AA (sangat memuaskan).

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja menunjukkan nilai sebesar 13,56 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00 atau 90,4 % dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat AA (sangat memuaskan).

4) Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai sebesar 9,63 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 10,00 atau 96 % dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat AA (sangat memuaskan).

5) Evaluasi atas Capaian Kinerja dengan nilai 18,37 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 20,00 atau 91,85 % dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat AA (sangat memuaskan).

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi untuk mencapai maksimal hasil 100%.

Dipindai dengan CamScanner

3. Penutup

a. Kesimpulan

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100 dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan memperoleh nilai sebesar 95,98 dengan Predikat AA (Sangat Memuaskan).

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik.

Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Inspektur,

AMSARNO S. SARUMAHA, SH., MH
PEMBINA TK.I
NIP. 19800216 200611 1 001

Dipindai dengan CamScanner

MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI INSPEKTORAT

Lampiran 10

MATRIKS RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP

No	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Penyampaian dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disesuaikan dengan persyaratan sebagaimana tertuang pada Permanpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Mempedomani Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 dalam menyusun dan menyampaikan dokumen Evaluasi LAKIP sesuai yang dipersyaratkan	Dokumen disusun sesuai petunjuk teknis pelaporan kinerja instansi pemerintah	31 Januari 2026 s.d tanggal 13 Maret 2026	FOTUHO LAIA, S.E.	Dapat terselesaikan dengan baik
2	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi untuk mencapai maksimal 100%	Membuat rencana aksi dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029	Program dan kegiatan dapat tercapai dengan baik dengan menetapkan target indikator kinerja yang terukur	08 Januari 2026 s.d 12 Januari 2026	FOTUHO LAIA, S.E.	Selesai tepat waktu

Teluk Dalam, 04 Maret 2026

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Nias Selatan,

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN DINAS PKP

FOTUHO LAIA, S.E.
Pembina Tk. I
NIP. 19710223 200112 1 001

FOTO KEGIATAN FISIK T.A 2025

Lampiran II

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

Pekerjaan : SEMENISASI JALAN DARI DESA SIFALAGO SUSUA MENUJU DESA HILIBOHOU KECAMATAN SUSUA

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

Pekerjaan : SEMENISASI JALAN DARI DESA SIFALAGO SUSUA MENUJU DESA HILIBOHOU KECAMATAN SUSUA

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

Pekerjaan : SEMENISASI JALAN DARI DESA SIFALAGO SUSUA MENUJU DESA HILIBOHOU KECAMATAN SUSUA

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

Pekerjaan : SEMENISASI JALAN DARI DESA SIFALAGO SUSUA MENUJU DESA HILIBOHOU KECAMATAN SUSUA

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

Pekerjaan : PERKERASAN JALAN DESA SISOBAHILI KECAMATAN SUSUA

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

Pekerjaan : PERKERASAN JALAN DESA SISOBAHILI KECAMATAN SUSUA

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

Pekerjaan : PERKERASAN JALAN DESA SISOBAHILI KECAMATAN SUSUA

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

Pekerjaan : PERKERASAN JALAN DESA SISOBAHILI KECAMATAN SUSUA

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

Pekerjaan : PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH/ BRONJONG DESA SIFALAGO SUSUA KECAMATAN SUSUA

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

Pekerjaan : PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH/ BRONJONG DESA SIFALAGO SUSUA KECAMATAN SUSUA

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

Pekerjaan : PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH/ BRONJONG DESA SIFALAGO SUSUA KECAMATAN SUSUA

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

Pekerjaan : PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH/ BRONJONG DESA SIFALAGO SUSUA KECAMATAN SUSUA

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

Pekerjaan : PEMBANGUNAN AIR BERSIH DESA SIFALAGO SUSUA KECAMATAN SUSUA

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

Pekerjaan : PEMBANGUNAN AIR BERSIH DESA SIFALAGO SUSUA KECAMATAN SUSUA

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

Pekerjaan : PEMBANGUNAN AIR BERSIH DESA SIFALAGO SUSUA KECAMATAN SUSUA

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

Pekerjaan : PEMBANGUNAN AIR BERSIH DESA SIFALAGO SUSUA KECAMATAN SUSUA

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

Pekerjaan : PEMBANGUNAN AIR BERSIH DESA SIFALAGO SUSUA KECAMATAN SUSUA

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

Pekerjaan : PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH TPT DESA HILIDANAYAO KECAMATAN SUSUA

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

Pekerjaan : PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH TPT DESA HILIDANAYAO KECAMATAN SUSUA

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

Pekerjaan : PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH TPT DESA HILIDANAYAO KECAMATAN SUSUA

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

Pekerjaan : PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH TPT DESA HILIDANAYAO KECAMATAN SUSUA

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

Pekerjaan : PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH TAFULU KECAMATAN MAZO

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

Pekerjaan : PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH TAFULU KECAMATAN MAZO

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

Pekerjaan : PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH TAFULU KECAMATAN MAZO

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

Pekerjaan : PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH TAFULU KECAMATAN MAZO

PERBUP NO. 72 TAHUN 2025

TENTANG RENSTRA PD KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025-2029

SALINAN

BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN

Nomor : 72 **SERI : E**

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 72 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang : a. bahwa penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan perwujudan dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, berlandaskan pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembangunan di Kabupaten Nias Selatan;

b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah serta menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;

c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Gubernur/Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias

Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan RPJM Nasional terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
11. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.
12. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
13. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan RPJMD yang diperoleh dengan teknik sasaran *cascading* (penurunan) kinerja.
14. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menetapkan dokumen Renstra PD sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan menjadikan dokumen Renstra PD sebagai pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD dan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Nias Selatan.

SALINAN

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Renstra PD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah.
(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Renstra PD meliputi :

a. BAB I : PENDAHULUAN;
b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
e. BAB V : PENUTUP.

BAB III
PENETAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang terdiri atas :
   1. Dinas Pendidikan
   2. Dinas Kesehatan
   3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
   4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
   5. Satuan Polisi Pamong Praja
   6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
   7. Dinas Sosial
   8. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
   9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   10. Dinas Pangan
   11. Dinas Lingkungan Hidup
   12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   14. Dinas Perhubungan
   15. Dinas Komunikasi dan Informatika
   16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
   17. Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
   18. Dinas Perpustakaan dan Arsip

19. Dinas Perikanan
20. Dinas Pertanian
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22. Sekretariat Daerah
23. Sekretariat DPRD
24. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27. Inspektorat
28. Kecamatan Lolomatua
29. Kecamatan Gomo
30. Kecamatan Lahusa
31. Kecamatan Hibala
32. Kecamatan Pulau-Pulau Batu
33. Kecamatan Teluk Dalam
34. Kecamatan Amandraya
35. Kecamatan Lolowau
36. Kecamatan Susua
37. Kecamatan Maniamolo
38. Kecamatan Hilimegai
39. Kecamatan Toma
40. Kecamatan Mazino
41. Kecamatan Umbunasi
42. Kecamatan Aramo
43. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur
44. Kecamatan Mazo
45. Kecamatan Fanayama
46. Kecamatan Ulunoyo
47. Kecamatan Huruna
48. Kecamatan O'o'u
49. Kecamatan Onohazumba
50. Kecamatan Hilisalawa"Ahe
51. Kecamatan Ulususua
52. Kecamatan Sidua'ori
53. Kecamatan Somambawa
54. Kecamatan Boronadu
55. Kecamatan Simuk
56. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat
57. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
58. Kecamatan Tanah Masa
59. Kecamatan Luahagundre Maniamolo
60. Kecamatan Onolalu
61. Kecamatan Uluidanotae
62. Kecamatan Idanotae
63. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

(2) Rincian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

SALINAN

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 5 November 2025

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

SOKHIATULO LAIA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 5 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA
Pembina Utama Madya
Nip. 19660412 199203 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN,

ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19820403 200903 1 007